

**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH  
(LKIP)  
KEMANTREN GANDOMANAN  
TAHUN 2021**



**Disusun oleh:  
Kemantren Gondomanan**

**PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA  
KEMANTREN GANDOMANAN**

*Handwritten signature in blue ink.*

Jl. Ibu Ruswo No 3 A Yogyakarta Kode Pos: 55121 Telp. (0274) 376783 Fax (0274) 376783  
EMAIL: [gm@jogjakota.go.id](mailto:gm@jogjakota.go.id) HOTLINE SMS: 08122780001  
HOTLINE EMAIL: [upik@jogjakota.go.id](mailto:upik@jogjakota.go.id)  
WEBSITE: [www.jogjakota.go.id](http://www.jogjakota.go.id)

## KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga Laporan Kinerja Kemantren Gondomanan Tahun 2021 dapat tersusun. Dasar Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah adalah Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Instansi Pemerintah (AKIP) serta berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Adapun tujuan dari penyusunan dan penyampaian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini adalah dalam rangka pertanggungjawaban instansi kepada pemerintah atasan dan kepada masyarakat mengenai kinerjanya.

Dengan demikian transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang menjadi tuntutan di era ekonomi daerah sekarang ini dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Selanjutnya instansi pemerintah ini diharapkan dapat mengarah pada terwujudnya *Good Governance*.

Semoga laporan ini dapat menjadi bahan evaluasi dan peningkatan motivasi kerja bagi Kemantren Gondomanan untuk peningkatan kinerja pada masa yang akan datang. Kami menyadari sepenuhnya bahwa LKIP ini masih terdapat kelemahan dan kekurangan, maka saran dan kritik sangat diharapkan dalam rangka perbaikan dan penyempurnaan.

Yogyakarta, 31 Desember 2021  
Mantri Pamong Praja Gondomanan

Subarjilan, SIP.,M.Si  
NIP.19720711 199203 1 006

## **Executive Summary**

Sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Instansi Pemerintah (AKIP) serta berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka Kemantren Gondomanan telah menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah tahun 2021 sebagai bentuk pertanggungjawaban instansi kepada pemerintah atasan dan kepada masyarakat mengenai kinerjanya.

Sasaran strategis yang akan dicapai pada tahun 2021 adalah nilai perkembangan pembangunan Kemantren Gondomanan meningkat. Sasaran ini dicapai melalui 3 (tiga) sasaran antara yaitu : (1) Nilai survei kepuasan masyarakat meningkat, (2) nilai swadaya murni masyarakat meningkat, dan (3) jumlah pelanggaran Perda menurun.

Secara umum kinerja Kemantren Gondomanan di tahun 2021 dalam mencapai sasaran yang ditetapkan masuk dalam kriteria Sangat Tinggi (diatas 91%). Sasaran strategis nilai perkembangan pembangunan tercapai 367 dari target 366,5 (100,14%). Sasaran antara : (1) nilai survei kepuasan masyarakat tercapai 88,57 dari target 87,7 (101%), angka swadaya masyarakat tercapai Rp480.256.250,- dari target Rp469.200.000,- (102%) dan jumlah pelanggaran Perda menurun dari target 160 terjadi 145 kali (capaian kinerja 109,38%). Kinerja keuangan Kemantren Gondomanan juga sangat tinggi, dari target anggaran Rp7.317.432.209,- terealisasikan Rp7.033.509.909,- dengan prosentase capaian 96,12%.

Faktor kunci yang menjadi pendorong keberhasilan kinerja Kemantren Gondomanan di tahun 2021 antara lain adalah : ketersediaan anggaran yang semakin memadai; kualitas dan kompetensi SDM yang makin meningkat, perencanaan, monitoring dan evaluasi; inovasi sistem dan prosedur pelayanan; pemanfaatan teknologi informasi; dan penerapan sistem *reward and punishment* untuk meningkatkan motivasi dan semangat kerja pegawai. Selain itu dukungan faktor eksternal seperti : peran lembaga sosial kemasyarakatan; partisipasi dan swadaya masyarakat yang tinggi; dan sinergitas antar lembaga dalam Forkompimka juga sangat berpengaruh terhadap efektivitas dan keberhasilan pencapaian tujuan.

## DAFTAR ISI

Halaman Judul .....	i
Kata Pengantar .....	ii
<i>Executive Summary</i> .....	iii
Daftar Isi .....	iv
Daftar Tabel .....	vi
Daftar Gambar .....	viii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Maksud dan Tujuan .....	2
C. Gambaran Umum Kemantren Gondomanan.....	3
1. Kondisi Wilayah .....	4
2. Struktur Organisasi .....	7
3. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi .....	8
4. Isu-isu Strategis Organisasi .....	10
a. Pelayanan Masyarakat .....	10
b. Pemberdayaan Masyarakat .....	13
c. Pembangunan Kewilayahan .....	14
d. Pengarusutamaan Gender dalam Perencanaan Pembangunan.....	14
e. Keterbukaan Informasi Publik .....	15
5. Keadaan Pegawai .....	15
6. Keadaan Sarana Prasarana dan Keuangan .....	18
D. Sistematika Penyajian .....	18
<b>BAB II PERENCANAAN KINERJA</b> .....	20
A. Perencanaan Strategis 2017-2022 .....	20
1. Visi dan Misi .....	20
2. Tujuan dan Sasaran.....	21
3. Strategi, Program dan Kegiatan .....	23
B. Perjanjian Kinerja .....	25

C. Rencana Anggaran Tahun 2021.....	26
1. Target Belanja Kemantren Gondomanan .....	26
2. Alokasi Anggaran Per Sasaran Strategis .....	27
<b>BAB III AKUNTABILITAS KINERJA .....</b>	<b>28</b>
A. Capaian Kinerja Organisasi.....	28
1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2021.....	28
2. Perbandingan Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun 2021 dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Sebelumnya..	33
3. Perbandingan Realisasi Kinerja sampai dengan Tahun 2021 dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra.....	37
4. Evaluasi dan Analisa Capaian Kinerja Sasaran Strategis .....	38
a. Sasaran Tingkat Perkembangan Pembangunan Kemantren Gondomanan Meningkatkan .....	38
b. Analisis Penyebab Keberhasilan atau Kegagalan atau Peningkatan atau Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang dilakukan .....	41
5. Realisasi Anggaran .....	46
a. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya .....	49
b. Analisis Program Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan atau Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja .....	50
B. Inovasi dan Prestasi.....	52
1. Inovasi .....	52
2. Prestasi .....	53
C. Tindak Lanjut Rekomendasi LKIP Tahun 2020 .....	54
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>56</b>
A. Kesimpulan.....	56
B. Rencana Tindak Lanjut.....	56
<b>LAMPIRAN .....</b>	

## DAFTAR TABEL

Tabel I.1 Jumlah Penduduk Kemantren Gondomanan Tahun 2021 .....	5
Tabel I.2 Jumlah RW dan RT Kemantren Gondomanan .....	5
Tabel I.3 Jumlah Pegawai Berdasarkan Jabatan, Golongan dan Jenis Kelamin .....	16
Tabel I.4 Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenis Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan.....	16
Tabel I.5 Jumlah Pegawai Berdasarkan Pendidikan dan Jenis Kelamin .....	17
Tabel I.6 Jumlah Pegawai Berdasarkan Eselon .....	17
Tabel II.1 Sasaran Strategis, Sasaran Antara, Program dan Kegiatan Kemantren Gondomanan Tahun 2021 .....	24
Tabel II.2 Perjanjian Kinerja Murni Tahun 2021.....	25
Tabel II.3 Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2021.....	26
Tabel II.4 Target Belanja Kemantren Gondomanan APBD Perubahan Tahun 2021 .....	23
Tabel II.5 Anggaran Belanja Non Pegawai Per Sasaran Strategis.....	24
Tabel III.1 Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Kemantren Gondomanan.....	28
Tabel III.2 Skala Nilai Peringkat Kinerja .....	29
Tabel III.3 Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Kinerja Sasaran/ Tujuan .....	30
Tabel III.4 Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Program .....	30
Tabel III.5 Data Nilai Swadaya Murni Masyarakat Tahun 2020 dan 2021 .....	32
Tabel III.6 Prosentase Perbandingan antara Target dan Realisasi Capaian Kinerja Program Tahun Anggaran 2021 .....	33
Tabel III.7 Perbandingan Capaian dan Realisasi Kinerja Tahun 2021 dengan Tahun 2020 .....	34
Tabel III.8 Perbandingan Capaian dan Realisasi Kinerja Tahun 2021 dengan tahun-tahun Sebelumnya.....	35
Tabel III.9 Perbandingan Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun 2021 dengan Tahun Lalu.....	36
Tabel III.10 Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Utama .....	37
Tabel III.11 Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Program dengan target Renstra .....	37

Tabel III.12 Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan .....	38
Tabel III.13 Anggaran dan Realisasi Belanja Non Pegawai per Sasaran Tahun 2021 .....	47
Tabel III.14 Anggaran dan Realisasi Kegiatan Kemantren Gondomanan Tahun 2021 .....	48
Tabel III.15 Data Efisiensi Anggaran Pelaksanaan Kegiatan Perangkat Daerah Kemantren Gondomanan Tahun 2021 .....	49
Tabel III.16 Rekomendasi Inspektorat terhadap LKIP Tahun 2020 dan Tindaklanjutnya.....	55

## DAFTAR GAMBAR

Peta Kemantren Gondomanan .....	4
Bagan Struktur Organisasi Kemantren .....	7
Grafik Perbandingan Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun 2021 dengan Tahun Lalu .....	36



## DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Struktur Organisasi
- Lampiran 2 Perencanaan Strategis (Matriks Renstra Lima Tahun)
- Lampiran 3 Perjanjian Kinerja dan Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2021
- Lampiran 4 Tanggapan/Tindak Lanjut LKIP Tahun Sebelumnya
- Lampiran 5 Pengukuran Kinerja Triwulan I-IV (print SIM e-LAKIP)
- Lampiran 6 Rencana Aksi (print dari e-LAKIP)
- Lampiran 7 Penghargaan yang Pernah Diterima
- Lampiran 8 Tabel I.7 Data Sarana dan Prasarana Kemantren Gondomanan
- Lampiran 9 Tabel I.8 Dokumen Pelaksanaan Anggaran Kemantren Gondomanan Tahun 2021
- Lampiran 10 Berita Acara Evaluasi Perkembangan Pembangunan Kelurahan se Kemantren Gondomanan Tahun 2021
- Lampiran 11 Hasil Survei Kepuasan Masyarakat
- Lampiran 12 Rekapitulasi Laporan Swadaya Murni Kelurahan Tahun 2021
- Lampiran 13 Rekapitulasi Laporan Kegiatan Tramtibum
- Lampiran 14 Daftar Nominatif Pegawai Kemantren Gondomanan bulan Desember 2021

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Tuntutan transparansi atau keterbukaan dalam pemerintahan menjadi hal yang penting dalam rangka mewujudkan tata pemerintahan yang baik dan bersih (*good governance and clean government*). Oleh karena itu transparansi dipandang menjadi suatu keharusan untuk diwujudkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Tentu saja hal itu juga sesuai dengan semangat zaman yang serba terbuka, seiring dengan perkembangan teknologi dan regulasi informasi.

Instansi pemerintah harus bertanggung jawab (*accountable*) dan melaporkan kinerjanya kepada pihak yang memiliki wewenang untuk meminta pertanggungjawaban. Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) dilaksanakan setiap tahun sebagai upaya untuk mewujudkan suatu instansi pemerintah yang senantiasa memperbaiki kinerjanya secara terus menerus dan berkelanjutan.

Laporan Kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) adalah salah satu rangkaian kegiatan yang harus dilakukan setiap tahun sebagai manifestasi dari evaluasi semua rangkaian kinerja dan kegiatan yang telah dilakukan selama satu tahun anggaran. Kesemuanya terangkum dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP), yang selain sebagai bahan evaluasi capaian dari rangkaian program yang telah dicanangkan pada awal tahun anggaran juga sebagai bahan pijakan dalam menyusun langkah-langkah pada tahun berikutnya. Dasar penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah adalah:

- a. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat RI Nomor: XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

- b. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi;
- c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
- e. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- f. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia Nomor 135 Tahun 2004 tentang Pedoman Umum Evaluasi Akuntabilitas Kinerja;
- g. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah; dan
- h. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

## **B. Maksud dan Tujuan**

Laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja. Adapun maksud penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kemantren Gondomanan adalah:

1. Memberikan gambaran kinerja penyelenggaraan pemerintahan Kemantren Gondomanan secara jelas, transparan dan akuntabel.
2. Wujud pertanggungjawaban keberhasilan/kegagalan pencapaian target sasaran selama tahun anggaran 2021 yang dicerminkan dari hasil

pencapaian kinerja berdasarkan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran yang telah ditetapkan.

Tujuan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kemantren Gondomanan adalah:

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai pada tahun 2021.
2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya.
3. Meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap Pemerintah Kemantren Gondomanan dalam penerapan azas profesional, transparan dan akuntabel.

### **C. Gambaran Umum Kemantren Gondomanan**

Kemantren Gondomanan merupakan salah satu kemantren di Kota Yogyakarta dengan luas 112.00 Ha dan terdiri dari 2 (dua) kelurahan yaitu Kelurahan Ngupasan dan Kelurahan Prawirodirjan. Jumlah penduduk Kemantren Gondomanan pada akhir tahun 2021 adalah sebesar 14,784 jiwa terdiri atas 7.204 jiwa penduduk berjenis kelamin laki-laki dan 7.580 jiwa penduduk berjenis kelamin perempuan. Dengan luas dan jumlah penduduk tersebut maka tingkat kepadatan penduduk Kemantren Gondomanan menjadi 13.200 jiwa/km<sup>2</sup>.

Secara geografis posisi Kemantren Gondomanan merupakan jantungnya Kota Yogyakarta, pusat perekonomian Yogyakarta yang terkenal dengan kawasan Malioboro, Pasar Beringharjo, Alun-alun Utara dan Titik Nol Kilometer. Gondomanan juga masih memiliki gedung-gedung peninggalan sejarah, sekarang disebut dengan gedung cagar budaya seperti Benteng Vredeburg, Gedung Agung/Istana Negara, Bank Indonesia, Kantor Pos, Bank BNI, Masjid Gedhe Kauman dan Gedung Societet Militer/Taman Budaya. Sebagai daerah perkotaan yang padat dan menjadi subyek pariwisata, sebagian penduduk Kemantren Gondomanan bekerja di sektor perdagangan dan jasa.



Tabel I.1  
Jumlah Penduduk Kemantren Gondomanan Tahun 2021

Kelurahan	Luas km2	Jumlah Penduduk	Kepadatan Penduduk (jiwa/km2)
(1)	(2)	(3)	(4)
Prawirodirjan	0,45	9.212	20.471
Ngupasan	0,67	5.572	8.316
Jumlah	1,12	14.784	13.200

Sumber dari BPS Kota Yogyakarta (Buku Kemantren Gondomanan dalam Angka Tahun 2021)

Kemantren Gondomanan juga terbagi menjadi sejumlah kampung, RW dan RT di Kemantren Gondomanan sebagai berikut :

Tabel I.2  
Jumlah RW dan RT Kemantren Gondomanan

Kelurahan	Perangkat Kelurahan	RW	RT
(1)	(2)	(3)	(4)
Prawirodirjan	7	18	61
Ngupasan	8	13	49
Jumlah	15	31	110

Sumber dari BPS Kota Yogyakarta (Buku Kemantren Gondomanan dalam Angka Tahun 2021)

Selain lembaga-lembaga tersebut diatas juga terdapat kelembagaan masyarakat dan sosial lainnya baik di tingkat Kemantren maupun Kelurahan, diantaranya:

- a. Lembaga Pemberdayaan masyarakat Kelurahan (LPMK) Ngupasan dan Prawirodirjan.
- b. Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) Kelurahan Ngupasan dan Prawirodirjan.
- c. Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) tingkat Kemantren dan Kelurahan, Kelompok PKK RW, Kelompok PKK RT dan Dasawisma.
- d. Kampung (ada 7 kampung yaitu : Ngupasan, Ketandan, Ratmakan, Kauman, Yudonegaran, Sayidan, Prawirodirjan).

- e. Lembaga-lembaga kemasyarakatan baik di tingkat Kemantren maupun Kelurahan antara lain :
- Karang Taruna Kemantren dan Kelurahan;
  - Kecamatan Sehat, Kelurahan Siaga;
  - Ikatan Pekerja Sosial Masyarakat (IPSM);
  - Forum Komunikasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Forkom UMKM);
  - Gabungan Organisasi Penyelenggara Taman Kanak-kanak Indonesia (GOPTKI);
  - Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah (TP UKS);
  - Paguyuban Kesenian;
  - Paguyuban Lansia;
  - Kelompok Kerja (Pokja) Bunda PAUD di tingkat Kemantren dan Kelurahan;
  - Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis);
  - Kampung KB;
  - Kampung Ramah Anak, Kelurahan Ramah Anak;
  - Kampung Panca Tertib;
  - Kampung Wisata;
  - Kampung Tangguh Bencana (KTB);
  - Gapoktan dan Forum Gapoktan;
  - Kampung Hijau;
  - KONI Korman Gondomanan;
  - Forum Kemantren Inklusi Gondomanan;
  - Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM); dan
  - Forum Pembauran Kebangsaan (FPK).

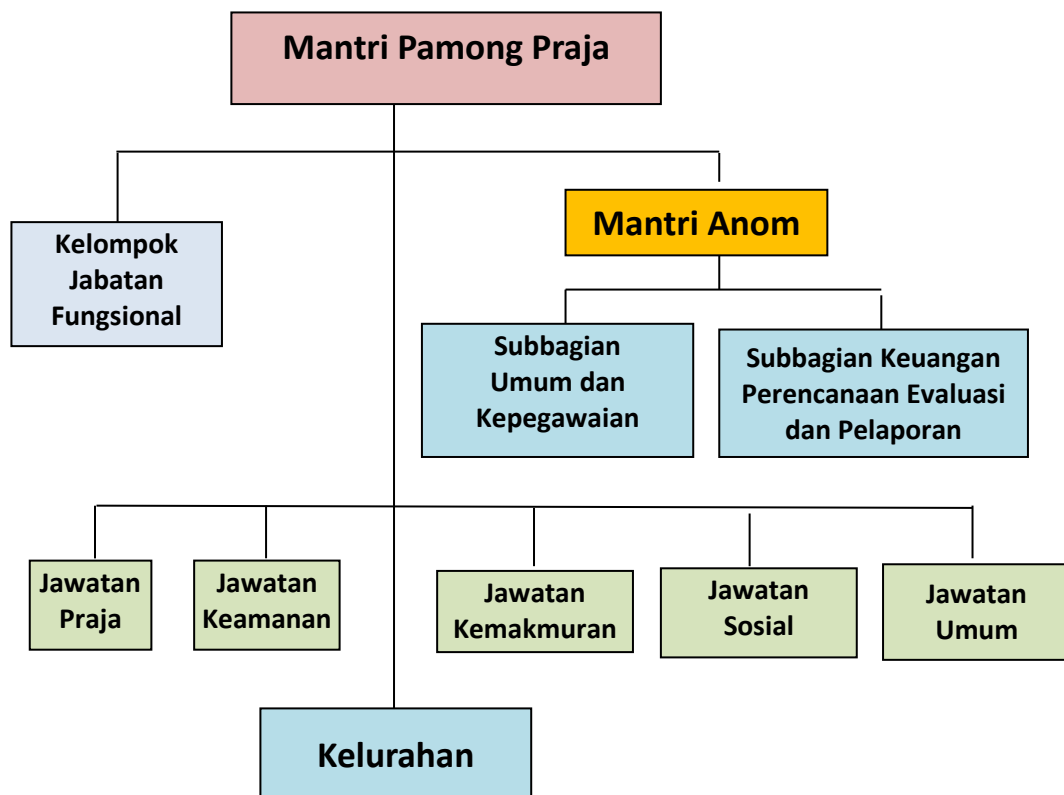
## **2. Struktur Organisasi**

Dalam Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 121 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kemantren dan Kelurahan Kota Yogyakarta, Susunan Organisasi Kemantren Gondomanan adalah terdiri dari :

- a. Mantri Pamong Praja;
- b. Sekretariat yang dipimpin oleh Mantri Anom terdiri dari :
  - 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
  - 2. Sub Bagian Keuangan, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.
- c. Jawatan Praja;
- d. Jawatan Keamanan;
- e. Jawatan Kemakmuran;
- f. Jawatan Sosial;
- g. Jawatan Umum; dan
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Kemantren Gondomanan mempunyai struktur organisasi sebagai berikut:

Bagan Struktur Organisasi Kemantren





### **3. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi**

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Pasal 50 ayat 1 (satu) disebutkan bahwa Kecamatan (Kemantren) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf f dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa atau sebutan lain dan kelurahan.

Oleh karena itu kemantren merupakan salah satu fungsi penunjang yang melaksanakan tugas dan fungsi sebagai pembantu Kepala Daerah dalam melaksanakan fungsi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat, dimana dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya Kemantren dibantu oleh Kelurahan yang berkedudukan sebagai perangkat Kemantren.

Pembentukan organisasi Kemantren di Wilayah Kota Yogyakarta tidak terlepas dari adanya dinamika atau perubahan Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah yang mengatur tentang Pemerintahan Daerah. Namun dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, kecamatan/Kemantren menjadi salah satu perangkat daerah yang diatur melalui Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta tersebut dan juga Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 121 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kemantren dan Kelurahan Kota Yogyakarta pada Pasal 2 disebutkan bahwa Kemantren dipimpin oleh seorang Mantri Pamong Praja yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Selanjutnya pada Pasal 4 disebutkan bahwa Kemantren mempunyai tugas mengkoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat, dan

kelurahan di wilayah masing-masing. Sedangkan fungsi kemantren tertera pada Pasal 5 sebagai berikut:

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 diatas, Kemantren mempunyai fungsi :

- a. pengoordinasian perencanaan penyelenggaraan pemerintahan umum, ketenteraman dan ketertiban umum, perekonomian dan pembangunan, kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum, dan melaksanakan penugasan urusan keistimewaan pada tingkat Kemantren;
- b. pengoordinasian tugas dan fungsi unsur organisasi Kemantren;
- c. penyelenggaraan kegiatan pemerintahan umum di tingkat Kemantren;
- d. penyelenggaraan kegiatan ketenteraman dan ketertiban di tingkat Kemantren;
- e. penyelenggaraan kegiatan perekonomian dan pembangunan di tingkat Kemantren;
- f. penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan dan kesejahteraan masyarakat di tingkat Kemantren;
- g. penyelenggaraan pembinaan teknis kelembagaan pemberdayaan masyarakat di tingkat Kemantren;
- h. penyelenggaraan kegiatan pelayanan umum di tingkat Kemantren;
- i. penerbitan dokumen perizinan dan/atau dokumen nonperizinan sesuai kewenangan Kemantren;
- j. pengoordinasian dan fasilitasi kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh instansi pemerintah di tingkat Kemantren;
- k. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan Kelurahan;
- l. pengoordinasian pelaksanaan sebagian kewenangan yang dilimpahkan oleh Walikota;

- m. pengoordinasian pelaksanaan penugasan keistimewaan di tingkat Kemantren;
- n. pengoordinasian pelaksanaan kegiatan kesekretariatan Kemantren;
- o. pembinaan dan pengoordinasian penyelenggaraan tugas dan fungsi kelompok jabatan fungsional pada Kemantren;
- p. pengoordinasian penyelenggaraan pengelolaan kearsipan dan perpustakaan Kemantren;
- q. pengoordinasian pelaksanaan reformasi birokrasi, sistem pengendalian internal pemerintah, zona integritas, ketatalaksanaan, dan budaya pemerintahan Kemantren;
- r. pengoordinasian tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan;
- s. pengoordinasian pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi, dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas Kemantren; dan
- t. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas Kemantren.

Selain melaksanakan fungsi tersebut diatas, kemantren di Kota Yogyakarta juga melaksanakan pelimpahan kewenangan dari Walikota Yogyakarta dengan ditetapkannya Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 131 Tahun 2020 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Walikota kepada Mantri Pamong Praja. Peraturan Walikota tersebut sebagai penyempurnaan dari peraturan walikota yang mengatur sebelumnya.

#### **4. Isu-isu Strategis Organisasi**

##### **a. Pelayanan Masyarakat**

Kemantren merupakan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang berfungsi sebagai garda terdepan dalam pelayanan kepada masyarakat, sehingga citra pelayanan yang diberikan oleh kecamatan kepada masyarakat mencerminkan pula citra pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Kota Yogyakarta pada umumnya.

Oleh karena itu maka perbaikan dalam sistem pelayanan di tingkat kemantren menjadi hal yang harus terus menerus dilakukan.

Dalam rangka optimalisasi peran strategis pelayanan kecamatan untuk mendukung tatakelola pemerintahan yang baik sejalan dengan apa yang digariskan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, yang mengatur pula azas-azas pelayanan publik yang harus diperhatikan, antara lain:

- 1) Kepentingan umum;
- 2) Kepastian hukum;
- 3) Kesamaan hak;
- 4) Keseimbangan hak dan kewajiban;
- 5) Profesionalisme;
- 6) Partisipatif;
- 7) Persamaan perlakuan/tidak diskriminatif;
- 8) Keterbukaan;
- 9) Akuntabilitas;
- 10) Fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan;
- 11) Ketepatan waktu; dan
- 12) Kecepatan, kemudahan, dan keterjangkauan.

Sesuai dengan Permendagri Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pelayanan Administrasi Terpadu Kemantren (PATEN), peran dan fungsi kemantren sebagai pusat pelayanan masyarakat makin diteguhkan dan pada tanggal 12 Desember 2012 PATEN di kemantren se Kota Yogyakarta diresmikan oleh Walikota Yogyakarta. Hal itu menunjukkan tekad dan komitmen Pemerintah Kota Yogyakarta dalam mewujudkan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Sejalan dengan itu, dalam rangka sinkronisasi antara kebutuhan masyarakat dalam pelayanan dengan kemampuan atau kapasitas kecamatan dalam memberikan fasilitas dan kualitas pelayanan kepada masyarakat maka telah disusun Standar Pelayanan Publik (SPP) yang dalam proses penyusunannya melibatkan unsur masyarakat. Dalam rangka optimalisasi PATEN

didukung dengan 4 (empat) program dan 12 (duabelas) kegiatan yang mendukung pencapaian tujuan OPD.

Permendagri Nomor 4 Tahun 2010 Pasal 5 menyebutkan bahwa kecamatan (kemantren) sebagai penyelenggara PATEN harus memiliki persyaratan substantif, administratif dan teknis. Secara substantif Mantri Pamong Praja telah menerima pelimpahan sebagian kewenangan dari Walikota Yogyakarta sesuai dengan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 135 Tahun 2020 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Walikota kepada Mantri Pamong Praja, yang mencakup pula kewenangan di bidang perizinan dan non perizinan. Persyaratan administratif juga telah dipenuhi dengan adanya Standar Pelayanan Publik (SPP) sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya. Selanjutnya persyaratan teknis telah dipenuhi dengan adanya sarana dan prasarana pendukung pelayanan. Pemenuhan persyaratan teknis lainnya adalah kesiapan aparatur birokrasi di tingkat kemantren.

Kemantren merupakan ujung tombak pelayanan kepada masyarakat. Berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 62 Tahun 2003 disebutkan bahwa penyelenggaraan pelayanan harus memenuhi beberapa prinsip, salah satunya adalah kelengkapan sarana dan prasarana, yaitu tersedianya sarana dan prasarana kerja dan pendukung lainnya yang memadai termasuk penyediaan sarana teknologi telekomunikasi dan informasi (telematika).

Dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat, maka di Kemantren Gondomanan telah dilengkapi dengan gedung kantor dan juga sarana pendukung kelancaran pelayanan maupun penunjang kegiatan administrasi perkantoran (perangkat keras dan lunak), sehingga mendukung dalam menunjang pelaksanaan kegiatan baik untuk kebutuhan administrasi perkantoran maupun pelayanan kepada masyarakat. Kemantren Gondomanan juga telah melakukan perbaikan dan pengadaan sarana dan prasarana kerja

antara lain perbaikan dan pemeliharaan alat-alat kantor, pembelian alat kantor, perbaikan gedung kantor kemantren dan Kelurahan.

#### **b. Pemberdayaan Masyarakat**

Pemberdayaan masyarakat merupakan sebuah upaya untuk melibatkan partisipasi masyarakat dalam pengambilan kebijakan mulai dari perencanaan sampai dengan pelaksanaan kegiatan dan pengawasan. Pengambilan kebijakan kecamatan dimulai dari proses Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) sejak dari tingkat kampung, tingkat kelurahan dan kemantren yang melibatkan representasi unsur-unsur dalam masyarakat. Perencanaan pada sisi ini merupakan hasil dari masukan masyarakat (*bottom up planning*) melalui musyawarah pembangunan. Namun sejalan dengan pelimpahan kewenangan yang begitu dinamis maka beberapa aspek perencanaan juga bersifat *given* atau ditetapkan oleh pemerintah tingkat atasnya baik Pemerintah Kota, Provinsi maupun Pemerintah Pusat melalui dinas-dinas/instansi terkait. Sehingga proses perencanaan *bottom up planning* harus dipadukan dengan perencanaan yang bersifat *topdown*.

Pemberdayaan masyarakat pada tataran kemantren dilakukan melalui kegiatan fisik maupun non fisik yang menjadi kewenangan Mantri Pamong Praja dan Lurah sesuai dengan peraturan walikota tentang pelimpahan kewenangan. Kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan kemantren dan kelurahan antara lain berupa pelatihan, penyuluhan, sosialisasi, peningkatan kapasitas kader masyarakat atau kelompok masyarakat. Kegiatan pemberdayaan masyarakat ini direncanakan oleh masyarakat, sasaran, penerima manfaat dan pelaksanaanya juga dari masyarakat, hingga pengawasan monitoring dan evaluasi pun selalu melibatkan partisipasi masyarakat secara langsung.

### **c. Pembangunan Kewilayahan**

Pelaksanaan pembangunan wilayah yang bersifat kegiatan pembangunan fisik harus mengacu pada perwal pelimpahan kewenangan. Sehingga kegiatan bersifat fisik dalam pembangunan selain perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi yang melibatkan warga masyarakat harus memperhatikan kewenangan yang dimiliki oleh kecamatan selain kemampuan pagu anggaran atau pendanaan dari Pemerintah Kota Yogyakarta.

### **d. Pengarusutamaan Gender dalam Perencanaan Pembangunan**

Perspektif pengarusutamaan gender menjadi pertimbangan dan harus selalu diintegrasikan dalam kegiatan pembangunan fisik maupun kegiatan yang bersifat non fisik. Dengan kata lain pengarusutamaan gender menjadi bagian dari perencanaan pembangunan yang dilakukan oleh setiap Perangkat Daerah. Output dari program yang dilakukan oleh Perangkat Daerah Kecamatan tetap responsif dan sensitif terhadap kebijakan pengarusutamaan gender, dimana sasaran dan perencanaan melibatkan kelompok rentan 5 (lima) afirmatif gender yaitu perempuan, warga miskin, lansia, anak-anak dan penyandang disabilitas.

Setiap program yang dilakukan harus melibatkan 5 (lima) kelompok afirmatif gender mulai dari proses perencanaan. Partisipasi dalam perencanaan tidak boleh membatasi apalagi menghalangi aspirasi dan kebutuhan kelompok rentan sebagaimana yang telah disebutkan pada paragraf sebelumnya, sesuai dengan kondisi dan ketersediaan sumber daya yang dimiliki Kemantren Gondomanan. Hal yang sama juga dilakukan pada pelaksanaan program dan kegiatan Perangkat Daerah (pemenuhan hak akses) namun tetap memperhatikan kewenangan yang diberikan oleh Walikota Yogyakarta kepada Mantri Pamong Praja.

#### **e. Keterbukaan Informasi Publik**

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik memberikan amanat kepada badan publik untuk dapat menyajikan informasi publik sesuai dengan jenisnya terutama terhadap permohonan informasi publik yang berada dalam penguasaannya. Oleh karena itu perlu adanya standar yang jelas dan mudah bagi pemohon informasi publik. Demikian juga dengan pengelolaan internal informasi publik yang menjadi penguasaan badan publik harus lebih tertib dan tertata dengan baik agar jika sewaktu-waktu dibutuhkan dapat segera disajikan dengan baik. Meskipun demikian, sebagian informasi publik mungkin tidak dapat diberikan kepada pihak pemohon, dengan alasan tertentu sesuai dengan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. Sebuah informasi dapat dikategorikan sebagai informasi yang dikecualikan sehingga tidak dapat diakses oleh publik sebagaimana informasi yang lainnya.

#### **5. Keadaan Pegawai**

Keadaan Sumber Daya Manusia (SDM) pegawai di Kemantren Gondomanan sampai dengan akhir tahun 2021 terdiri atas PNS 26 orang Naban 2 orang dan PTT 5 orang. Total jumlah pegawai (PNS dan Naban/TT) Kemantren Gondomanan adalah 33 orang, dari jumlah formasi sesuai hasil analisis jabatan sebanyak 50 orang, sehingga kebutuhan pegawai baru terpenuhi 66% atau terdapat kekurangan 17 orang. Beberapa jabatan struktural yang kosong karena pejabat pemangku jabatan yang bersangkutan telah memasuki usia pensiun telah terisi terhitung mulai tanggal pelantikan 18 Oktober 2021. Meskipun demikian masih ada beberapa jabatan fungsional umum yang belum terisi. Agar kinerja organisasi dapat terus berjalan optimal maka beberapa jabatan fungsional umum kemudian dipenuhi dengan cara *outsourcing* atau pengadaan kontrak kerja dengan penyedia jasa orang perseorangan (tenaga teknis) sesuai ketentuan yang berlaku.



Untuk data selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel I.3**  
Jumlah Pegawai Kemantren Gondomanan Berdasarkan Jabatan,  
Golongan dan Jenis Kelamin

NO	Uraian	Laki-laki	Perempuan	Gol. I	Gol. II	Gol. III	Gol. IV	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Mantri Pamong Praja	1	-	-	-	-	1	1
2.	Mantri Anom	-	1	-	-	-	1	1
3.	Kepala Jawatan	2	3	-	-	4	1	5
4.	Kasubbag	1	1	-	-	2	-	2
5.	Jabfung umum Kec.	1	5	-	4	2	-	6
7.	Lurah	2	-	-	-	2	-	2
8.	Sekretaris Kel.	1	1	-	-	2	-	2
9.	Kasi Kelurahan	3	3	-	-	6	-	6
10.	Jabfung umum Kel.	-	1	1	-	-	-	1
11.	Naban	2	-	-	-	-	-	2
12.	Tenaga Teknis	3	2	-	-	-	-	5
	Jumlah	16	17	1	4	18	3	33

Sumber : Sekretariat Kemantren Gondomanan, 2021

Data Diklat Struktural/penjenjangan bagi pejabat struktural:

**Tabel I.4**  
Jumlah pegawai berdasarkan jenis Pendidikan dan Pelatihan  
Kepemimpinan

No	Jenis Diklat	Jumlah	Jenis Kelamin	
			Laki-laki	Perempuan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Diklatpim III/PKA	2	1	1
2	Diklatpim IV/Adum/PKP	8	4	4
4	Pejabat Struktural yang belum mengikuti diklat penjenjangan	9	4	5

Sumber : Sekretariat Kemantren Gondomanan, 2021

Sedangkan jumlah pegawai berdasarkan pendidikan dan jenis kelamin dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel I.5**  
**Jumlah Pegawai Berdasarkan Pendidikan dan Jenis Kelamin**

No	Pendidikan	Jumlah	Jenis Kelamin	
			Laki-laki	Perempuan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	S2	3	1	2
2	S1	15	9	6
3	D III	4	-	4
4	SLTA	2	-	2
5	SLTP	1	1	-
6.	SD	1	-	1
	Jumlah	26	11	15

*Sumber : Sekretariat Kemantren Gondomanan, 2021*

Jumlah Pegawai Kemantren Gondomanan berdasarkan Eselonering adalah sebagai berikut:

**Tabel I.6**  
**Jumlah pegawai berdasarkan eselon**

No	Eselon	Jumlah	Jenis Kelamin	
			Laki-laki	Perempuan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	III A	1	1	-
2	III B	1	-	1
3	IV A	7	4	3
4	IV B	10	5	5
	Jumlah	19	10	9

*Sumber : Sekretariat Kemantren Gondomanan, 2021*

Dari tabel-tabel diatas dapat diketahui bahwa dari aspek kualitas, kompetensi yang dimiliki SDM pegawai Kemantren Gondomanan sudah cukup memadai, meskipun secara kuantitas masih belum mencukupi.

## **6. Keadaan Sarana Prasarana dan Keuangan**

Dalam melaksanakan kegiatan, dukungan sarana dan prasarana diperlukan dalam suatu instansi. Berikut ini kami sampaikan keadaan sarana prasarana berupa barang-barang inventaris yang sangat berpengaruh dalam mendukung pelaksanaan tugas Instansi Kemantren Gondomanan sebagaimana terlampir pada tabel I.7 (Data Sarana dan Prasarana Kemantren Gondomanan).

Untuk melaksanakan semua kegiatan berbasis kinerja secara optimal, maka diperlukan dukungan anggaran yang terinci sesuai jenis penggunaannya. Dukungan anggaran bagi Kemantren Gondomanan sebagaimana terlampir pada tabel I.8 (Dokumen Pelaksanaan Anggaran Kemantren Gondomanan Tahun 2021).

Dukungan dana atau anggaran yang tersedia untuk melaksanakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah Kemantren Gondomanan pada tahun 2021 berasal dari APBD Kota Yogyakarta. Pada tahun anggaran 2021 Kemantren Gondomanan mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp7.317.432.909,- dengan rincian belanja Pegawai sebesar Rp3.566.384.080,- dan belanja Non Pegawai sebesar Rp3.751.048.129,- yang diperuntukkan baik untuk mendukung pelaksanaan program yang berkaitan langsung dengan indikator sasaran strategis maupun program-program pendukung. Belanja Non Pegawai yang berasal dari APBD sebesar Rp3.751.048.129,- yang didukung oleh 4 (empat) program dan 12 (duabelas) kegiatan.

### **D. Sistematika Penyajian**

#### **BAB I PENDAHULUAN**

Dalam bab ini memuat tentang alasan disusun LKIP/manfaat LKIP, Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi Kemantren Gondomanan, Potensi yang menjadi ruang lingkup Perangkat Daerah dan Sistematika penulisan LKIP.

## BABII PERENCANAAN KINERJA

Pada bagian ini disajikan gambaran singkat mengenai rencana strategis, dan dan perjanjian kinerja. Pada awal bab disajikan gambaran secara singkat sasaran utama yang ingin diraih instansi pada tahun yang bersangkutan serta bagaimana kaitannya dengan capaian visi dan misi Kepala Daerah.

## BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Pada bagian ini disajikan uraian hasil pengukuran kinerja, evaluasi, dan analisis akuntabilitas kinerja. Termasuk didalamnya menguraikan secara sistematis perbandingan data kinerja secara memadai, keberhasilan/kegagalan, dan permasalahan yang dihadapi serta langkah-langkah antisipatif yang akan diambil.

Disajikan pula akuntabilitas keuangan dengan cara menyajikan rencana dan realisasi anggaran bagi pelaksanaan tugas dan fungsi atau tugas-tugas lainnya dalam rangka mencapai sasaran organisasi yang telah ditetapkan, termasuk analisis tentang capaian indikator kinerja dan efisiensi.

Disajikan pula Inovasi yang telah dilakukan oleh Perangkat daerah. Inovasi dimaknai sebagai penemuan hal-hal baru atau proses kreatif terhadap sesuatu yang sudah ada maupun yang sudah ada sebelumnya. Inovasi dianggap mampu meningkatkan nilai tambah output kegiatan yang berkualitas

## BAB IV PENUTUP

Pada bagian ini dikemukakan simpulan secara umum tentang keberhasilan/kegagalan, permasalahan dan kendala utama yang berkaitan dengan kinerja instansi yang bersangkutan serta strategi pemecahan masalah

## BAB II PERENCANAAN KINERJA

### A. Perencanaan Strategis 2017 - 2022

#### 1. Visi dan Misi SKPD

##### a. Visi

Visi Pembangunan Kota Yogyakarta periode 2017-2022 dari Walikota terpilih adalah **“Meneguhkan Kota Yogyakarta sebagai kota nyaman huni dan pusat pelayanan jasa yang berdaya saing kuat untuk keberdayaan masyarakat dengan berpijak pada nilai keistimewaan”**.

##### b. Misi

Berdasarkan visi, misi, dan tugas dan fungsi pelayanan, maka Perangkat Daerah Kemantren Gondomanan Kota Yogyakarta mempunyai peran dalam mewujudkan visi di atas melalui 7 (tujuh) misi yaitu :

- 1) Meningkatkan Kesejahteraan dan Keberdayaan Masyarakat;
- 2) Memperkuat ekonomi kerakyatan dan daya saing Kota Yogyakarta;
- 3) Memperkuat moral, etika, dan budaya masyarakat Kota Yogyakarta;
- 4) Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan, sosial, dan budaya;
- 5) Memperkuat tata kota dan kelestarian lingkungan;
- 6) Membangun sarana prasarana publik dan permukiman; dan
- 7) Meningkatkan tata kelola pemerintah yang baik dan bersih.

Dalam mewujudkan dan melaksanakan visi dan misi tersebut diatas, Kemantren Gondomanan selanjutnya menjabarkannya ke dalam program dan kegiatan yang lebih operasional yang diarahkan untuk mendukung pencapaian Sasaran Pemerintah Daerah yaitu :

- 1) Kemiskinan masyarakat menurun;
- 2) Keberdayaan masyarakat meningkat;
- 3) Ketahanan pangan masyarakat meningkat;
- 4) Ketimpangan pendapatan antar penduduk menurun;
- 5) Pertumbuhan ekonomi meningkat;
- 6) Gangguan ketentraman dan ketertiban masyarakat menurun;
- 7) Kualias pendidikan meningkat;
- 8) Harapan hidup masyarakat meningkat;
- 9) Peran serta masyarakat dalam pengembangan dan pelestarian budaya meningkat;
- 10) Infrastruktur wilayah meningkat;
- 11) Kualitas lingkungan meningkat; dan
- 12) Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat

## 2. Tujuan dan Sasaran

### a. Tujuan

Tujuan merupakan implementasi dari pernyataan misi. Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan pada jangka waktu satu sampai dengan lima tahun ke depan. Sejalan dengan itu maka Kemantren Gondomanan memiliki tujuan yang akan dicapai melalui pelaksanaan program dan kegiatan kemantren. Adapun tujuannya yaitu **“Meningkatkan Perkembangan Pembangunan Kemantren Gondomanan”**

Tujuan tersebut akan diukur melalui indikator kinerja tujuan, yaitu Nilai evaluasi perkembangan pembangunan Kemantren Gondomanan dengan formula : ***jumlah nilai evaluasi perkembangan pembangunan kelurahan dibagi jumlah kelurahan***. Pada awal Renstra (2017) nilai indikator tujuan adalah 350, sedangkan target tujuan pada akhir Renstra (2022) adalah 367.

### b. Sasaran

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan, yaitu sesuatu yang akan dicapai oleh suatu instansi pemerintah dalam jangka waktu

pendek (tahunan, semesteran, bulanan). Dari masing-masing tujuan yang telah ditetapkan dalam Renstra Instansi Kemantren Gondomanan menetapkan sasaran sebagai berikut: **“Tingkat perkembangan pembangunan Kemantren Gondomanan meningkat”**. Sasaran tersebut akan diukur melalui indikator kinerja sasaran, yaitu nilai evaluasi perkembangan pembangunan Kemantren Gondomanan dengan formula: ***Jumlah nilai evaluasi perkembangan pembangunan kelurahan : jumlah kelurahan***.

Pada awal Renstra nilai indikator tujuan adalah 350, sedangkan target tujuan pada akhir Renstra adalah 360. Namun dalam perkembangannya, karena capaian nilai evaluasi perkembangan pembangunan Kemantren Gondomanan di tahun 2018 melampaui target yang telah ditetapkan (dari target 352 tercapai 365,5), maka dilakukan penyesuaian target di tahun 2019 yang semula 354 direvisi menjadi 365,5 (minimal sama dengan capaian tahun sebelumnya), sedangkan di tahun 2021 ditargetkan di angka 366,5.

Pengukuran kinerja di dalam Rencana Strategik Instansi digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan dalam pelaksanaan kegiatan, program dan kebijakan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan untuk mewujudkan misi Rencana Strategik Instansi Kemantren Gondomanan. Agar dalam pelaksanaan Rencana Strategik Kemantren Gondomanan terdapat kesatuan arah kebijakan, maka diperlukan adanya landasan berpijak. Untuk mewujudkannya diperlukan serangkaian upaya yang mampu mengakselerasi pencapaian tujuan yang telah ditetapkan, yaitu meliputi :

- 1) Meningkatkan derajat keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa dengan moral dan budi pekerti yang tinggi.
- 2) Mengupayakan peningkatan kesejahteraan masyarakat baik lahir maupun batin.

- 3) Menciptakan pemerintahan yang baik, bertanggung jawab dan bebas dari KKN untuk memulihkan kepercayaan kepada masyarakat.
- 4) Meningkatkan pemberdayaan masyarakat dalam proses penentuan kebijakan.
- 5) Mengupayakan penegakan supremasi hukum untuk menciptakan ketentraman, ketertiban dan keamanan masyarakat.
- 6) Mewujudkan kelestarian lingkungan hidup untuk mendukung keberlanjutan pembangunan.
- 7) Meningkatkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya berpedoman pada pelayanan yang prima.
- 8) Pelaksanaan pelayanan dilakukan secara procedural dan sesuai peraturan perundangan yang berlaku.
- 9) Fasilitasi dan motivasi berdasarkan pada tingkat kewenangan dilakukan berdasar pada kemitraan dan kerjasama yang sejajar antara masyarakat, pemerintah dan dunia usaha.
- 10) Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dari Pajak dan Retribusi dilaksanakan berdasar pada target dan penetapannya.

### **3. Strategi, Program dan Kegiatan**

Setelah menentukan tujuan dan sasaran, maka langkah selanjutnya perlu ditentukan bagaimana hal tersebut dapat dicapai. Cara mencapai tujuan dan sasaran merupakan strategi organisasi. Adapun cara untuk mencapai tujuan dan sasaran serta kerangka perencanaan strategis di Kemantren Gondomanan adalah dengan langkah-langkah pengambilan kebijakan, program dan perencanaan pelaksanaan kegiatan. Kebijakan yang diambil berkaitan dengan perencanaan strategis Kemantren Gondomanan tertuang di dalam kerangka perencanaan Strategis di Kemantren Gondomanan adalah dengan menetapkan 4 (empat) program dan 12 (duabelas) kegiatan sebagai berikut :



Tabel II.1  
 Sasaran Strategis, Sasaran Antara, Program dan Kegiatan  
 Kemantren Gondomanan Tahun 2021

N o.	Sasaran Strategis	Sasaran Antara	Program	Kegiatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Tingkat perkembangan pembangunan Kemantren Gondomanan meningkat	Nilai Reformasi Birokrasi meningkat	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</li> <li>– Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</li> <li>– Administrasi Umum Perangkat Daerah</li> <li>– Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</li> <li>– Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</li> </ul>
Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Meningkat		Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan pelayanan Publik	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kemantren</li> <li>– Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum</li> <li>– Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Mantri Pamong Praja</li> </ul>	
Jumlah Pelanggaran Perda menurun		Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan ketertiban Umum</li> <li>– Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah</li> </ul>	
Angka Swadaya Masyarakat meningkat		Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan kelurahan	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan</li> <li>– Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan</li> </ul>	

*Sumber : Sekretariat Kemantren Gondomanan, 2021*

Dengan mengacu pada tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan di atas perlu adanya dukungan untuk membangun semangat mencapai tujuan dengan motto **"SATU HATI UNTUK MELAYANI"**, mengandung maksud bahwa dalam setiap langkah melaksanakan kinerja untuk mewujudkan visi dan misi instansi tidak hanya sebagai pemenuhan kewajiban dan aturan namun juga dilandasi dengan hati ikhlas sebagai sebuah ibadah. Dengan berpegang pada motto ini diharapkan dalam melaksanakan kinerja tidak hanya fokus pada target semata namun juga didasari dengan keikhlasan dan berlandaskan pada delapan asas nilai, yakni : Sederhana, Adanya kepastian/kejelasan, Keamanan, Transparansi, Efisien, Ekonomis, Keadilan dan Ketepatan Waktu.

## B. Perjanjian Kinerja

Rencana kinerja merupakan hasil dari proses penetapan perencanaan kegiatan tahunan dan indikator kinerja berdasarkan program, kebijakan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra OPD. Secara ringkas perencanaan kinerja Kemantren Gondomanan pada tahun 2021 baik program kegiatan maupun besarnya alokasi anggaran dapat dilihat pada penetapan kinerja (perjanjian kinerja) sebagai berikut:

Tabel II.2  
Perjanjian Kinerja Murni Tahun 2021

Sasaran Strategis (1)	Indikator Kinerja (2)	Tar-get (3)	Program Kegiatan (4)	Anggaran (Rp) (5)
Tingkat perkembangan pembangunan Kemantren Gondomanan meningkat	Nilai evaluasi perkembangan pembangunan Kemantren Gondomanan	366,5	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	3.657.133.527
			Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	
			Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	

Sumber : Sekretariat Kemantren Gondomanan, 2021

Melalui mekanisme perubahan anggaran APBD 2021 maka perjanjian kinerja mengalami perubahan sebagai berikut :

Tabel II.3  
Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2021

Sasaran Strategis (1)	Indikator Kinerja (2)	Tar-get (3)	Program Kegiatan (4)	Anggaran (Rp) (5)
Tingkat perkembangan pembangunan Kemantren Gondomanan meningkat	Nilai evaluasi perkembangan pembangunan Kemantren Gondomanan	366,5	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	3.751.048.129
			Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	
			Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	

Sumber : Sekretariat Kemantren Gondomanan, 2021

### C. Rencana Anggaran Tahun 2021

Pada Tahun Anggaran 2021 Kemantren Gondomanan melaksanakan kegiatan yang dibiayai dengan anggaran murni sebesar Rp7.043.412.284,- dengan rincian Belanja Pegawai Rp3.386.978.757,- dan Belanja Non Pegawai Rp3.657.133.527,-.

Melalui mekanisme perubahan APBD 2021 menjadi Rp7.317.432.209,- dengan rincian Belanja Pegawai Rp 3.566.384.080,- dan Belanja Non Pegawai Rp3.751.048.129,-.

#### 1. Target Belanja Kemantren Gondomanan

Target Belanja Kemantren Gondomanan Tahun 2021 ditetapkan sebagai berikut :

Tabel II.4

## Target Belanja Kemantren Gondomanan APBD Perubahan 2021

Uraian	Target	Prosentase
(1)	(2)	(3)
Belanja Pegawai	Rp. 3.566.384.080,-	48,75 %
Belanja Non Pegawai	Rp. 3.751.048.129,-	51,26 %
Jumlah	Rp. 7.317.432.209,-	100%

Sumber : Sekretariat Kemantren Gondomanan, 2021

## 2. Alokasi Anggaran Per Sasaran Strategis

Anggaran belanja langsung Tahun 2021 Kemantren Gondomanan yang dialokasikan untuk pencapaian sasaran strategis adalah sebagai berikut:

Tabel II.5

## Anggaran Belanja Langsung per Sasaran Strategis

No.	Sasaran	Anggaran	Realisasi/ Prosentase	Kete- rangan
1	2	3	4	5
	Tingkat perkembangan pembangunan Kemantren Gondomanan meningkat	3.751.048.129	3.669.328.895 (97,82 %)	

Sumber : Sekretariat Kemantren Gondomanan, 2021

### BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

#### A. Capaian Kinerja Organisasi

Penyelenggaraan Pemerintahan menuju *Good Governance* dalam rangka reformasi birokrasi yang berbasis kinerja bukan hanya sekedar melaksanakan program/kegiatan yang sudah direncanakan tetapi juga berorientasi untuk mendorong perubahan, dimana program/kegiatan dan sumber daya anggaran adalah alat yang digunakan untuk mencapai rumusan perubahan, baik pada level keluaran, hasil maupun dampak. Akuntabilitas akan menunjukkan sejauh mana sebuah instansi pemerintahan telah memenuhi tugas dan mandatnya dalam penyediaan layanan publik yang langsung bisa dirasakan hasilnya oleh masyarakat. Karena itulah, pengendalian dan pertanggungjawaban program/kegiatan menjadi bagian penting dalam memastikan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah kepada publik telah dicapai. Sebagai bagian dari komitmen Pemerintah Kemantren Gondomanan untuk membangun akuntabilitas kinerja ini, adalah dengan mendorong pengendalian serta evaluasi yang transparan dan berorientasi pada perbaikan pelayanan publik.

#### 1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2021

Untuk mengukur keberhasilan tujuan dan sasaran strategis organisasi secara umum Kemantren Gondomanan memiliki Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai berikut :

Tabel III.1

Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Kemantren Gondomanan

Misi 1: Meningkatkan kesejahteraan dan keberdayaan masyarakat									
Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/sasaran	Target						Sumber data
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Meningkatkan perkembangan pembangunan Kemantren Gondomanan	Tingkat perkembangan pembangunan Kemantren Gondomanan meningkat	Nilai evaluasi perkembangan pembangunan Kemantren Gondomanan	350	352	365,5	366	<b>366,5</b>	367	Tingkat Perkembangan Pembangunan Kelurahan

Pengukuran Kinerja dilakukan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis Perangkat Daerah. Untuk menginterpretasi atas pencapaian indikator kinerja sasaran Perangkat Daerah digunakan skala nilai peringkat kinerja yang mengacu pada Formulir Tabel VII-C Permendagri No. 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah sebagai berikut:

Tabel III.2  
Skala Nilai Peringkat Kinerja

No.	Interval Nilai Realisasi Kinerja (%)	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
(1)	(2)	(3)
1.	$\geq 91$	Sangat Tinggi
2.	$76 \leq 90$	Tinggi
3.	$66 \leq 75$	Sedang
4.	$51 \leq 65$	Rendah
5.	$\leq 50$	Sangat Rendah

Membandingkan antara target dengan capaian kinerja akan semakin menarik apabila disajikan pula prosentase dari capaian kinerja tersebut. Untuk mencari prosentase capaian kinerja per kegiatan digunakan rumus : ***(realisasi capaian kinerja : target) x 100***. Sedangkan untuk mencari prosentase kualitas dari realisasi capaian kinerja program digunakan rumus: ***(jumlah prosentase capaian kinerja kegiatan: jumlah kegiatan)***.

Kinerja Kemantren Gondomanan dinilai berdasarkan pencapaian sasaran strategis Tingkat perkembangan pembangunan Kemantren Gondomanan meningkat dihitung dengan formula :

$$\frac{\text{jumlah nilai evaluasi perkembangan pembangunan kelurahan}}{\text{jumlah kelurahan}}$$

Nilai yang didapat kemudian dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan pada tahun berjalan. Capaian kinerja organisasi Kemantren Gondomanan pada Tahun Anggaran 2021 dapat disajikan sebagai berikut :

Tabel III.3

## Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Kinerja Sasaran/Tujuan

Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran/Tujuan	Target Tahun 2021	Realisasi Tahun 2021	% Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(1)
Meningkatkan perkembangan pembangunan pembangunan Kemantren Gondomanan	Tingkat perkembangan pembangunan Kemantren Gondomanan meningkat	Nilai evaluasi perkembangan pembangunan Kemantren Gondomanan	366,5	367	100,14%

Sumber : Sekretariat Kemantren Gondomanan, 2021

Dilihat dari tabel tersebut dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja organisasi Kemantren Gondomanan adalah **100,14%** dengan nilai peringkat kinerja **Sangat Tinggi**.

Selanjutnya capaian kinerja program tahun 2021 dapat dilihat pada tabel perbandingan target dan realisasi indikator program sebagai berikut:

Tabel III.4

## Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Program Tahun 2021

No	Program/Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi	Persentase
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(1)
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	96,12%	96,12%
2.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	87,9	88,57	101%
3.	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah pelanggaran Perda	160	145	109,38%
4.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Angka Swadaya Murni Masyarakat	Rp 469.200.000	Rp 480.256.500	102%

Sumber : Sekretariat Kemantren Gondomanan, 2021

Dari keempat program tersebut maka program yang mendukung pencapaian sasaran strategis Tingkat perkembangan pembangunan

Kemantren Gondomanan meningkat adalah : Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik; Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum; dan Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan.

Rumus penghitungan nilai indikator untuk sasaran strategis dan program-program tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik dengan indikator Nilai Survey Kepuasan Masyarakat, dihitung menggunakan rumus perhitungan Survey Kepuasan Masyarakat sesuai Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggaraan Pelayanan Publik dan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 63 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengukuran Survey Kepuasan Masyarakat di Pemerintah Kota Yogyakarta. Formulasinya adalah :  
***Jumlah NRR x nilai tertimbang dari 9 unsur x 25.***

Berdasarkan capaian kinerja program di Tahun Anggaran 2021 pada tabel di atas maka prosentase capaian kinerja terhadap indikator Nilai Survey Kepuasan Masyarakat dari target 87.9 tercapai **88,57** prosentase capaian **101%** dengan nilai peringkat kinerja **Sangat Baik**.

- b. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan dengan indikator Angka Swadaya Masyarakat, diperoleh dari rerata jumlah angka swadaya murni masyarakat di Kelurahan se Kemantren Gondomanan selama setahun. Formulasinya adalah :  
***Jumlah nilai swadaya murni kelurahan se Kemantren Gondomanan : jumlah kelurahan.***

Formula ini diperbarui dihitung mulai tahun 2020 sehubungan dengan adanya perubahan kebijakan pemberian Dana Alokasi Umum (DAU) Tambahan (atau dikenal sebagai Dana Kelurahan) yang menghapus komponen dana stimulan PMK, sehingga angka swadaya masyarakat dihitung dari data laporan nilai swadaya murni masyarakat, yaitu jumlah angka nominal kegiatan yang dibiayai secara swadaya oleh masyarakat. Data nilai swadaya masyarakat kelurahan se Kemantren Gondomanan dapat dilihat pada tabel berikut :



Tabel III.5  
Data Nilai Swadaya Murni Masyarakat Tahun 2020 dan 2021

NO	Kelurahan	Nilai swadaya murni tahun 2020 (Rp)	Nilai swadaya murni tahun 2021 (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Ngupasan	915.913.000	561.557.500
2.	Prawirodirjan	602.860.000	398.955.000
	Jumlah	1.518.773.000	960.512.500
	Rata-rata	759.386.500	480.256.250
	Target	460.000.000	469.200.000
	Persentase capaian	165,08%	102%

Sumber : Laporan Swadaya Murni Kelurahan Ngupasan dan Kelurahan Prawirodirjan, 2020 dan 2021.

Berdasarkan data capaian kinerja program di Tahun Anggaran 2021 pada tabel diatas maka untuk indikator swadaya masyarakat tercapai Rp480.256.250,- dari target Rp469.200.000,- sehingga prosentase capaian kinerjanya **102%** dengan nilai peringkat **Sangat Baik**.

- c. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum, dengan indikator penurunan jumlah pelanggaran Perda, dihitung dengan membandingkan jumlah pelanggaran Perda dengan target yang ditetapkan berdasarkan trend jumlah pelanggaran selama 3 tahun terakhir. Formula perhitungannya adalah sebagai berikut :

$$\frac{\text{Target} - (\text{realisasi} - \text{target})}{\text{Target}} \times 100\%$$

Berdasarkan data laporan Jawatan Keamanan diketahui bahwa jumlah pelanggaran Perda yang terjadi di wilayah Kemantren Gondomanan sepanjang tahun 2021 tercatat 145 kali dari target yang ditetapkan 160 kali, atau terjadi penurunan 9,37%. Dari formula diatas maka dapat diketahui prosentase capaian kinerja program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum di Tahun Anggaran 2021 untuk adalah **109,38%** dengan nilai peringkat **Sangat Baik**.

Dalam upaya merealisasikan program-program tersebut diatas secara efektif dan efisien maka perlu didukung aspek keuangan. Data pada tabel berikut ditunjukkan perbandingan target dan realisasi capaian kinerja keuangan program Tahun Anggaran 2021 sebagai berikut:

Tabel III.6  
 Prosentase Perbandingan antara Target dan Realisasi Capaian Kinerja  
 Program Tahun Anggaran 2021

No	Program/Kegiatan	Target(Rp)	Realisasi(Rp)	Prosentase
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4.654.083.817,-	4.415.278.991,-	94,80 %
2.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	303.624.153,-	300.948.656,-	99,12 %
3.	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	219.435.550,-	219.298.750,-	99,94 %
4.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	2.140.288.689,-	2.097.983.512,-	98,02 %
	<b>Jumlah/rata-rata</b>	<b>7.317.432.209,-</b>	<b>7.033.509.909,-</b>	<b>96,12 %</b>

*Sumber : Sekretariat Kemantren Gondomanan, 2021*

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa capaian target kinerja keuangan semua program berada diatas 91% atau masuk kategori capaian **Sangat Tinggi**. Bahkan untuk program kerja yang menjadi substansi dalam Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2021 yaitu Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik, Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum, dan Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan mencapai realisasi rata-rata 99,03%. Kondisi ini secara umum menunjukkan bahwa Kemantren Gondomanan telah menyusun perencanaan kegiatan dan keuangan yang baik dan mampu melaksanakan semua rencana secara efektif dan efisien serta mencapai target yang ditetapkan.

## 2. Perbandingan Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun 2021 dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Sebelumnya

Tabel berikut menyajikan informasi perbandingan realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2021 dengan tahun-tahun sebelumnya.

Tabel III.7

## Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2021 dengan Tahun 2020

Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target		Realisasi		% Capaian	
			2020	2021	2020	2021	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Meningkatkan perkembangan pembangunan Keman-tren Gondoma-nan	Tingkat perkem-bangan pemba-ngunan Keman-tren Gondoma-nan meningkat	Nilai evaluasi perkembangan pembangunan Keman-tren Gondomanan	366	366,5	366,5	367	100,14	100,14

Sumber : Sekretariat Kemantren Gondomanan, 2021

Dari tabel diatas terlihat bahwa capaian kinerja Kemantren Gondomanan tahun 2021 mengalami peningkatan 0,5 point dari capaian tahun sebelumnya, namun prosentase capaian kinerjanya sama. Hal ini menunjukkan bahwa tetap ada dinamika dan peningkatan dalam komponen-komponen parameter yang menyusun indikator nilai tingkat perkembangan pembangunan kelurahan/kemantren meskipun dalam skala yang kecil karena dipengaruhi oleh beberapa faktor eksternal yang terjadi dalam kurun waktu tahun 2020-2021, diantaranya dampak pandemi Covid19 yang mencapai puncaknya pada periode tersebut.

Dari data hasil penilaian tingkat perkembangan pembangunan di level kelurahan maka diketahui bahwa Kelurahan Prawirodirjan mendapatkan nilai yang lebih tinggi (376) daripada Kelurahan Ngupasan (358). Hal ini disebabkan perkembangan infrastruktur sarana prasarana dan dinamika kegiatan sosial ekonomi masyarakat di kelurahan Prawirodirjan yang dinilai relatif lebih cepat. Nilai nominal pembangunan sarana prasarana fisik dan fasilitas publik di Kelurahan Prawirodirjan relatif lebih besar, dimaksudkan untuk merespons usulan dan kebutuhan masyarakat yang telah direncanakan melalui mekanisme Musrenbang. Dengan sarana prasarana dan fasilitas publik yang semakin lengkap dan membaik maka akan mendorong masyarakat untuk semakin dinamis dalam melaksanakan kegiatan sosial ekonominya yang sempat terpuruk akibat dampak Pandemi Covid-19.

Sasaran strategis Kemantren Gondomanan pada RPJMD tahun 2017-2022 masih sama dengan RPJMD sebelumnya yaitu tingkat perkembangan pembangunan Keman-tren Gondomanan meningkat.

Seiring dengan terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, maka mulai tahun 2020 pada tataran Program dan indikator kinerja mengalami beberapa perubahan. Aspek yang berubah diantaranya pada nomenklatur program, formula indikator nilai swadaya masyarakat (yang semula adalah prosentase nilai swadaya komplemen stimulan PMK) dan penambahan indikator penurunan jumlah pelanggaran Perda untuk Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum. Dinamika tersebut menyebabkan kesulitan untuk membandingkan capaian realisasi kinerja indikator dengan periode tahun-tahun sebelumnya.

Pada tabel berikut memperlihatkan perbandingan capaian target kinerja tahun 2021 dengan tahun-tahun sebelumnya.

**Tabel III.8**  
**Perbandingan Capaian dan Realisasi Kinerja Tahun 2021**  
**dengan Tahun-tahun Sebelumnya.**

No	Program	Indikator	Target Tahun					Prosentase Realisasi Tahun				
			2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1.	Program Pnunjng Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase kelancaran administrasi keuangan & operasional perkantoran	100%	100%	100%	100%	100%	95,05 %	95,05 %	96,53 %	95,29	94.80%
2.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	87	87,02	87,4	87,7	87,9	87,63 (100,7 %)	87,51 (100,56%)	88,18 (100,89)	87,7 (100%)	88,57 (101%)
3.	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah pelanggaran Perda	-	-	-	-	160	-	-	-	-	145 (109,38 %)
4.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Angka Swadaya Masyarakat	10%	12%	14%	460.000.000	469.200.000	14%	25%	25%	759.386.500 (165,08%)	480.256.250 (102%)

*Sumber : Sekretariat Kemantren Gondomanan, 2021*

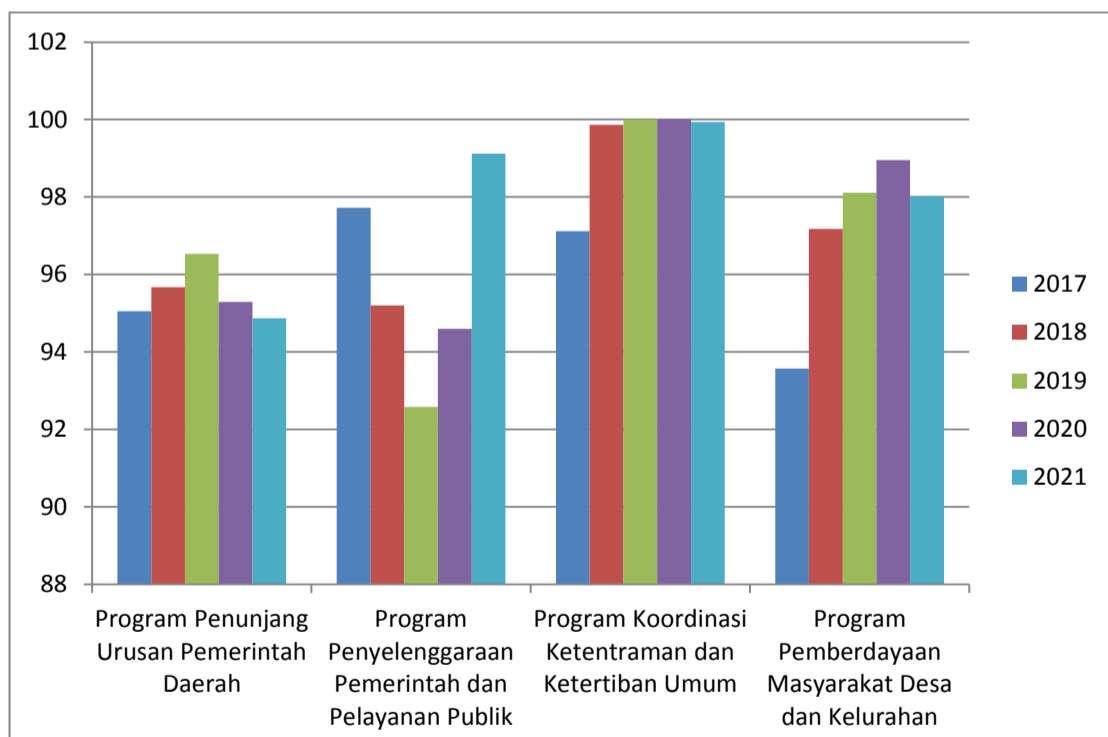
Sedangkan persentase perbandingan capaian kinerja masing-masing program Kemantren Gondomanan dapat dilihat pada tabel dan grafik di bawah ini :

Tabel III.9  
Perbandingan Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun 2021 dengan Tahun Lalu

No	Program/Kegiatan	Persentase Capaian Kinerja (%)				
		2017	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	95,05	95,67	96,53	95,29	94,87
2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	97,72	95,20	92,58	94,60	99,12
3	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	97,12	99,86	100	100	99,94
4	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	93,57	97,18	98,1	98,95	98,02

Sumber : Sekretariat Kemantren Gondomanan, 2021

Grafik III.9  
Perbandingan Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun 2021 dengan Tahun Lalu



### 3. Perbandingan Realisasi Kinerja sampai dengan Tahun 2021 dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra

Dalam menilai pencapaian tujuan jangka menengah yang ditetapkan dalam Renstra maka perlu dievaluasi capaian kinerja dari tahun ke tahun apakah sudah selaras dengan target tujuan tersebut.

Tabel III.10  
Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Kinerja Utama

Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran/ Tujuan	Target Tahun 2021	Realisasi Tahun 2021	Target Akhir Renstra	Capaian s/d 2021 terhadap target 2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(1)	(2)
Meningkatkan perkembangan pembangunan Kemantren Gondomanan	Tingkat perkembangan pembangunan Kemantren Gondomanan meningkat	Nilai evaluasi perkembangan pembangunan Kemantren Gondomanan	366,5	367	367	100%

Sumber : Sekretariat Kemantren Gondomanan, 2021

Selanjutnya capaian indikator kinerja program dapat disajikan pada tabel berikut:

Tabel III.11  
Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Program dengan Target Renstra

No	Program	Indikator	Target 2021	Realisasi 2021	Target Akhir Renstra	Prosentase capaian tahun ini terhadap target akhir Renstra
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase kelancaran administrasi keuangan dan operasional perkantoran	100%	94,87%	100%	94,87%
2.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	87.9	88,57 (101%)	88	99,43%
3.	Program Koordinasi Ketentraman Ketertiban Umum	Jumlah pelanggaran Perda	160	145 (109,38%)	157	107,6%
4.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Tingkat Perkembangan Pembangunan Kemantren	366.5	367 (100,1%)	367	100%
		Angka Swadaya Masyarakat	469.200.000	480.256.250 (102%)	478.584.000	100,3%

Sumber : Sekretariat Kemantren Gondomanan, 2021

Dari data pada tabel diatas terlihat bahwa capaian kinerja pada sasaran strategis dan semua program di Kemantren Gondomanan masuk kategori Sangat Tinggi dengan prosentase capaian yang melampaui target yang telah ditetapkan. Tentu hal ini tidak terlepas dari peran faktor-faktor yang mendukung kinerja Kemantren Gondomanan tersebut. Meskipun masih ada beberapa faktor penghambat, namun berkat sinergi yang kuat antara Pemerintah, masyarakat dan *stakeholder* serta motivasi dan semangat untuk melayani dengan hati, maka hambatan-hambatan yang ada dapat diatasi dan diminimalisir.

#### 4. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis

Dalam sub bab ini akan disajikan pencapaian sasaran strategis Kemantren Gondomanan yang dicerminkan dalam capaian Indikator Kinerja. Adapun evaluasi dan analisis secara rinci untuk setiap indikator kinerja menurut sasaran strategis diuraikan sebagai berikut:

##### a. Sasaran Tingkat perkembangan pembangunan Kemantren Gondomanan meningkat

Tolok ukur capaian sasaran Tingkat perkembangan pembangunan Kemantren Gondomanan meningkat didukung dengan 3 (tiga) indikator, yaitu : nilai survei kepuasan masyarakat, tingkat swadaya masyarakat dan penurunan angka pelanggaran Perda. Penjelasan hubungan sasaran, indikator dan formula indikator adalah sebagai berikut:

Tabel III.12  
Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan

No	Sasaran	Indikator	Formula Indikator
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Tingkat perkembangan pembangunan Kemantren Gondomanan meningkat	IKU : Nilai rata-rata tingkat perkembangan pembangunan masyarakat kelurahan	Jumlah nilai tingkat perkembangan pembangunan masyarakat kelurahan dibagi jumlah kelurahan
		Angka swadaya masyarakat	Jumlah nominal kegiatan yang dibiayai secara swadaya dibagi jumlah kelurahan
		Nilai survei kepuasan masyarakat	Jumlah NRR x nilai tertimbang dari 9 unsur x 25
		Penurunan jumlah pelanggaran Perda	Jumlah laporan pelanggaran Perda

Sumber : Sekretariat Kemantren Gondomanan,2021

Sasaran strategis tahun 2021 telah tercapai sesuai target yang ditetapkan, dan berdasarkan capaian pada tahun-tahun sebelumnya maka optimis target akhir Renstra di tahun kelima akan dapat dicapai. Selain itu, capaian target pada program-program yang mendukung sasaran strategis juga telah tercapai sesuai target yang ditetapkan bahkan melebihi target. Hal ini juga menunjukkan trend positif pencapaian kinerja program di tahun-tahun mendatang.

Penjelasan capaian kinerja pada masing-masing indikator program adalah sebagai berikut :

(1) Angka swadaya masyarakat, dari target Rp 469.200.000,- tercapai sebesar Rp 480.256.250,- atau pada prosentase 102% dari target yang ditetapkan. Secara umum terdapat penurunan prosentase capaian dari tahun sebelumnya (tahun 2020 tercapai 165,08%) disebabkan adanya beberapa kegiatan sosial masyarakat yang semula dilaksanakan dengan swadaya (pertemuan/rapat rutin RT, RW, PKK, Dasawisma) karena harus menerapkan protokol kesehatan maka ada yang dikurangi frekuensi atau jumlah pesertanya, ada pula yang ditiadakan untuk sementara.

Dari pencermatan laporan awal diperoleh data bahwa peningkatan swadaya murni terbesar di Kelurahan Ngupasan (sebesar Rp1.563.557.500,-), namun angka tersebut kemudian dikoreksi menjadi Rp561.557.500,- karena ada beberapa item yang disepakati untuk tidak dikategorikan sebagai swadaya murni sehingga harus didrop, yaitu sedekah jumat berkah dan takjil ramadhan. Sedangkan angka swadaya murni yang dikeluarkan masyarakat untuk berbagai kegiatan dalam rangka penanganan dampak pandemi Covid-19 di tingkat mikro tetap dicatat dan dilaporkan. Kegiatan yang dilakukan antara lain penyemprotan desinfektan, bantuan permakanan bagi warga yang isolasi mandiri, penyediaan tempat cuci tangan, edukasi protokol kesehatan, donasi untuk Dapur Balita Posyandu, dan pembentukan Satgas Covid-19 sampai tingkat RT.

Nilai swadaya murni di Kelurahan Prawirodirjan relatif konstan dari tahun-tahun sebelumnya (tercapai Rp 398.955.000,-) bahkan



sedikit menurun karena dampak pandemi menyebabkan kegiatan sosial ekonomi masyarakat menurun. Terdapat pula beberapa kegiatan dalam rangka penanganan dampak pandemi Covid-19 namun nilai swadaya tidak dilaporkan.

- (2) Nilai survei kepuasan masyarakat, dari target 87.9 tercapai 88,57 atau mengalami peningkatan 101%. Nilai rata-rata setiap unsur pelayanan adalah 3.543, dengan nilai tertinggi pada unsur biaya/tarif (nilai 3.620) dan terendah pada unsur waktu penyelesaian dan unsur penanganan pengaduan, saran dan masukan (nilai 3.540).

Peningkatan nilai survei kepuasan layanan secara umum dikarenakan situasi pandemi Covid-19 dalam rangka penegakan protokol kesehatan, dimana terjadi migrasi proses pelayanan dari manual/offline dirubah ke sistem layanan daring/online dengan mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi dan dukungan aplikasi *Jogja Smart Services (JSS)* yang semakin lengkap fiturnya, dan inovasi layanan secara *drive-thru* di beberapa titik oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta. Fasilitas ini gratis, dan bagi masyarakat pengguna layanan tentunya semakin menekan biaya yang harus dikeluarkan (untuk fotokopi berkas, transportasi ke lokasi pelayanan, dan lain-lain).

Untuk unsur layanan yang nilainya masih dibawah rata-rata juga telah dilakukan terobosan antara lain dengan pendampingan kepada pengguna layanan untuk meningkatkan kecepatan waktu layanan, dan meningkatkan responsifitas dalam penanganan pengaduan, saran dan masukan.

Selain itu untuk meningkatkan nilai kepuasan layanan secara umum dilakukan upaya antara lain : menyempurnakan beberapa SOP pelayanan disesuaikan dengan kebutuhan dan ketentuan di masa Pandemi; membuat video tutorial pelayanan untuk dishare di media sosial Kemantren dan warga; dan mengoptimalkan peran kader Pekerti dalam memfasilitasi dan mengakselerasi pelayanan dalam Paket Komanan.

- (3) Jumlah pelanggaran Perda, mengalami penurunan dari target yang ditetapkan karena adanya penerapan PPKM Mikro kegiatan

penegakan Perda lebih diintensifkan simultan dengan kegiatan penegakan protokol kesehatan pencegah penyebaran Covid-19. Persentase pelanggaran terbanyak adalah pedagang kakilima (PKL) yang tidak tertib karena berjualan di lokasi yang tidak diijinkan untuk berjualan (kawasan pedestrian), tidak menjaga kebersihan, dan tidak menaati aturan PPKM (terkait pembatasan jam buka tutup usaha, pembatasan jumlah pengunjung, penerapan *social distancing*, dan penyediaan tempat cuci tangan). Upaya penegakan Perda yang dilakukan antara lain : merelokasi PKL yang berjualan di kawasan pedestrian Jalan KHA Dahlan, penertiban PKL, dan patroli terpadu penegakan PPKM bersinergi dengan Forkompim Kemantren Gondomanan (Polsek, Koramil, Puskesmas, BKO, Satuan Linmas, dan Forum Komunitas Alun-alun Utara).

#### **b. Analisis Penyebab Keberhasilan atau Kegagalan atau Peningkatan atau Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Dilakukan**

Dari hasil analisis laporan pelaksanaan program kerja dan kegiatan Kemantren Gondomanan tahun 2021 dan sesuai dengan Perjanjian Kinerja yang telah ditetapkan, maka dapat dinyatakan bahwa Kemantren Gondomanan telah berhasil mencapai target dan tujuan organisasi. Sebagaimana diuraikan pada Bab II laporan ini. indikator kinerja berupa “Meningkatkan Tingkat Perkembangan Pembangunan Kemantren Gondomanan” pada tahun 2021 ditargetkan 366,5 sedangkan dilihat dari nilai rata-rata tingkat perkembangan pembangunan kelurahan se Kemantren Gondomanan tahun 2021 adalah 367 atau tercapai 100,1% dengan kategori capaian Sangat Tinggi.

Keberhasilan dalam pencapaian target tersebut diatas didukung oleh beberapa faktor antara lain:

##### 1) Faktor internal

###### (a) Ketersediaan anggaran yang semakin memadai

Program kerja yang direncanakan dapat terlaksana karena terencana dengan baik termasuk kebutuhan anggarannya. Pembiayaan dan anggaran sudah sesuai pula dengan standarisasi

yang ditetapkan oleh Pemerintah Kota Yogyakarta.

(b) Kualitas dan kompetensi SDM yang makin meningkat

Keterbatasan jumlah sumber daya manusia (pegawai) perangkat daerah Kemantren Gondomanan memang dapat menjadi kendala bagi kinerja perangkat daerah dalam melaksanakan program kerja. Namun keterbatasan kuantitas jika didukung dengan peningkatan kualitas dan kompetensi SDM ternyata mampu menjadi kekuatan potensial dan menghasilkan kinerja optimal. Melalui proses motivasi pembelajaran yang terus menerus maka Kemantren Gondomanan berhasil mengoptimalkan SDM yang dimiliki untuk merealisasikan program kegiatan yang direncanakan dan mencapai target yang ditetapkan.

(c) Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi

Perencanaan yang baik akan sangat menentukan keberhasilan kinerja dalam pencapaian target yang ditetapkan. Sedangkan monitoring dan evaluasi merupakan alat bagi pimpinan untuk dapat mengetahui perkembangan pelaksanaan program kerja dan kendala apa yang dihadapi sehingga segera dapat dicarikan jalan keluar. Guna mengefektifkan masa tahun anggaran untuk mempercepat pelaksanaan program dan kegiatan maka perencanaan yang telah disusun dalam bentuk RKA dan DPA SKPD Kemantren Gondomanan kemudian lebih didetailkan lagi. Tatakala kegiatan disusun sampai dengan level hari/tanggal pelaksanaan kegiatan dan target harian, sehingga semakin mempermudah dalam operasionalisasinya. Selain itu, secara simultan juga dilakukan monitoring dan evaluasi sesering mungkin sehingga meminimalisir celah terjadinya kesalahan, keterlambatan, atau penyimpangan. Apabila ditemui permasalahan dan hambatan pun dapat segera teridentifikasi dan dicarikan solusinya, agar tidak mengganggu upaya pencapaian target dan tujuan.

Dalam rangka penguatan sistem monitoring dan evaluasi guna meningkatkan efektivitas pencapaian tujuan serta responsivitas gender di semua program/kegiatan, maka setiap Pejabat Pengelola Teknis Kegiatan (PPTK) diharuskan menyusun kerangka acuan kerja (KAK), menyusun *Gender Analysis*

*Pathway/Gender Budget Statement (GAP/GBS)* dan melakukan analisis resiko dalam bentuk Rencana Tindak Pengendalian (RTP). Selain itu, pada akhir tahun anggaran setiap PPTK diwajibkan menyusun laporan dokumentasi kegiatan yang dilaksanakan selama kurun waktu Januari s/d Desember 2021 sebagai bentuk pertanggungjawaban dan dasar penilaian SKP (Sasaran Kerja Pegawai) pegawai yang bersangkutan.

(d) Inovasi Sistem dan Prosedur Pelayanan

Dalam upaya mengakselerasi pelaksanaan program kegiatan dan pencapaian tujuan maka suatu institusi harus terus berupaya mencari celah-celah inovasi yang bisa dilakukan. Selain adanya dorongan dari Pemerintah Kota untuk terus mengembangkan inovasi, inspirasi perubahan demi efisiensi dan terbaik melayani juga harus ditumbuhkan dalam diri setiap individu dalam organisasi. Beberapa inovasi dan penyederhanaan sistem prosedur pelayanan di Kemantren Gondomanan tahun 2021 antara lain :

- Penyempurnaan Paket Komanan

Paket Komanan yang dilaunching pada bulan September 2019 dan mendapat sambutan positif, dukungan dan apresiasi dari segenap warga masyarakat serta pihak-pihak terkait, disempurnakan dengan mengevaluasi dan menyesuaikan SOP paket layanan dengan perubahan aturan di tingkat yang lebih tinggi, situasi pandemi, dan perkembangan teknologi.

- Sosialisasi SOP pelayanan secara virtual

Untuk merespon keingintahuan masyarakat terhadap informasi prosedur baru pelayanan di masa pandemi, maka dilakukan sosialisasi secara virtual, mengingat kondisi pandemi tidak memungkinkan untuk mengumpulkan warga guna diberikan informasi pelayanan secara langsung. Sosialisasi dilakukan dengan membuat video pendek berdurasi 3-5 menit berisi tentang SOP dan tatacara mengakses layanan. Video kemudian disebarluaskan dengan diunggah ke website dan media sosial Kemantren Gondomanan, serta dishare ke grup-grup whatsapp RT/RW dan warga.

- Pendampingan pelayanan

Terhadap warga yang masih belum memahami prosedur pelayanan secara online, atau bagi warga yang memiliki keterbatasan dan kurang memahami penggunaan gadget maka dalam mengakses pelayanan bisa didampingi oleh petugas.

(e) Pemanfaatan teknologi informasi

Perkembangan teknologi informasi tak dipungkiri sangat membantu dalam mengakselerasi pencapaian target program dan kegiatan. Melalui aplikasi *Jogja Smart Services (JSS)* yang memuat ratusan macam SIM sangat memudahkan bagi warga masyarakat dan perangkat Kemantren Gondomanan dalam mengakses informasi, memberikan layanan, mengolah data, melakukan monitoring dan evaluasi, menyusun laporan, hingga menyampaikan publikasi sebagai wujud akuntabilitas.

(f) Penerapan *system reward and punishment* untuk meningkatkan motivasi dan semangat kerja pegawai

Dalam rangka mendorong motivasi berkinerja dan semangat berprestasi maka dipandang perlu untuk menerapkan *system reward and punishment*. Bentuknya adalah pemberian reward berupa piagam penghargaan dan hadiah dari pimpinan organisasi (Mantri Pamong Praja) bagi pegawai yang dapat mencapai kinerja yang tinggi, dan hukuman/sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi pegawai yang tidak mencapai target kinerja yang ditetapkan atau jika terbukti melakukan pelanggaran disiplin pegawai.

2) Faktor Eksternal

(a) Peran Lembaga Sosial Kemasyarakatan

Lembaga-lembaga sosial kemasyarakatan yang ada di Kemantren Gondomanan mulai dari tingkat terendah (RT, RW, kampung, kelurahan, kemantren) secara aktif dilibatkan dan berperan penting mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan, pemeliharaan, sampai dengan pengawasan, monitoring dan evaluasi kegiatan. Keterlibatan aktif dan intensif dari lembaga-lembaga sosial kemasyarakatan ini memberikan dampak positif

berupa makin meningkatnya ketepatan perencanaan, ketepatan sasaran, efektivitas, efisiensi dan kualitas kegiatan.

(b) Partisipasi dan Swadaya Masyarakat

Beberapa program yang terkait langsung dengan masyarakat, khususnya program pemberdayaan masyarakat, tentu harus didukung dengan partisipasi masyarakat itu sendiri, baik sebagai subyek maupun sasaran penerima manfaat kegiatan. Bahkan indikator nilai tingkat swadaya masyarakat ini menjadi cerminan tinggi rendahnya tingkat dukungan dan partisipasi masyarakat. Partisipasi masyarakat ini bisa diwujudkan dalam beragam bentuk mulai dari kesediaan untuk merubah pola pikir dan budaya yang kurang produktif, peningkatan ketrampilan yang berkontribusi positif terhadap perekonomian, swadaya masyarakat dalam kegiatan dan pembangunan sarana prasarana umum, dan lain sebagainya.

Partisipasi dan swadaya masyarakat dalam pembangunan secara lebih inklusif dibangun melalui Musrenbang Tematik, dimana tahapan Musrenbang di tingkat kemantren diformat secara horisontal dengan membentuk 3 (tiga) klaster, yaitu klaster pembangunan prasarana fisik, klaster kesehatan, perempuan dan anak, dan klaster ekonomi sosial budaya. Melalui sistem klasterisasi tersebut diharapkan pembahasan dan penyusunan rencana jangka pendek menengah dan panjang dari masing-masing klaster dapat lebih fokus, intensif, holistik dan integratif.

(c) Sinergitas antar lembaga dalam Forkompimka

Forum Komunikasi Pimpinan Kemantren (Forkompimka) yang terdiri dari Mantri Pamong Praja (selaku koordinator), Kapolsek, Danramil, Kepala UPT Puskesmas dan Kepala KUA dibentuk dalam rangka mengemban misi bersama untuk bersinergi menciptakan masyarakat yang aman damai sejahtera sesuai bidangnya masing-masing. Untuk itu diperlukan mekanisme komunikasi, koordinasi, sinergi dan integrasi yang intensif dan efektif agar tujuan dan kepentingan bersama dapat diwujudkan.

Beberapa contoh sinergitas yang telah dibangun antara lain :

- Keterlibatan Forkompimka dalam pemberian kado 17 GM bagi warga usia 17 tahun yang baru mengurus KTP, diberikan bingkisan yang salahsatunya berisi buletin yang materinya berasal dari masing-masing *stakeholder* Forkompimka, yang dimaksudkan guna memberikan bekal informasi yang lebih lengkap bagi remaja yang memasuki usia 17 tahun.
- keterlibatan UPT Puskesmas dan KUA dalam beberapa proses administrasi kependudukan yang terangkum dalam Paket Komanan,
- Sinergitas dalam penanganan Covid-19 dalam bentuk kegiatan bersama antara lain : edukasi kepada masyarakat tentang adaptasi kebiasaan baru, sosialisasi dan penegakan protokol kesehatan, verifikasi kegiatan sosial yang aman Covid-19, penegakan PPKM mikro, vaksinasi massal, penanganan isolasi mandiri, dan keterpaduan gerak dalam kegiatan Satgas Covid-19 Kemantren Gondomanan.
- Kebersamaan dalam berbagai kegiatan seperti penanganan masalah sosial di wilayah Kemantren Gondomanan, olahraga dan pemantauan wilayah bersama tiap Jumat pagi, dan sebagainya.

## 5. Realisasi Anggaran

Penyerapan anggaran Belanja Non Pegawai pada tahun 2021 sebesar 96,12% dari total anggaran yang dialokasikan. Realisasi anggaran untuk program/kegiatan utama sebesar 97,82%, sedangkan realisasi untuk program/kegiatan pendukung sebesar 94,33%. Jika dilihat dari realisasi anggaran per sasaran, penyerapan anggaran terbesar pada program/kegiatan di sasaran jumlah pelanggaran Perda menurun (99,94%). Sedangkan penyerapan terkecil pada program/kegiatan di sasaran pendukung (94,87%).

Jika dikaitkan antara kinerja pencapaian sasaran dengan penyerapan anggaran, pencapaian sasaran yang relatif baik dan diikuti dengan penyerapan anggaran kurang dari 100% menunjukkan bahwa dana yang disediakan untuk pencapaian sasaran pembangunan tahun 2021 telah mencukupi.

Anggaran dan realisasi belanja Non Pegawai tahun 2021 yang dialokasikan untuk membiayai program/kegiatan dalam pencapaian sasaran disajikan pada tabel berikut:

Tabel III.13

Anggaran dan Realisasi Belanja Non Pegawai per Sasaran Tahun 2021

No	Sasaran	Indikator	Kinerja			Anggaran		
			Target	Realisasi	% Realisasi	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Tingkat perkembangan pembangunan Keman-tren Gon-domanan mening-kat	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	87.9	88.57	101	303.624.153	300.948.655	99,12
		Jumlah pe-langgaran Perda	160	145	109,38	219.435.550	219.298.750	99,94
		Angka Swadaya Masyarakat	469.500.000	1.962.512.500	209	2.140.288.689	2.097.983.512	98,02
Jumlah						2.663.348.392	2.618.230.917	98,30
Total Belanja Non Pegawai						3.751.048.129	3.669.328.895	97,82

Sumber : Sekretariat Kemantren Gondomanan, 2021

Berdasarkan data pada tabel diatas maka dapat disimpulkan bahwa tingkat penyerapan anggaran untuk melaksanakan program-program yang mendukung pencapaian tujuan organisasi sangat tinggi. Meskipun demikian ada beberapa komponen biaya yang memang tidak dapat diserap maksimal (100%) karena efisiensi, dengan tanpa mengurangi kuantitas dan kualitas output yang dihasilkan.

Selanjutnya, untuk memperoleh gambaran yang lebih lengkap tentang kinerja organisasi maka anggaran dan realisasi program-program dirinci lagi per kegiatan sebagaimana terlihat pada tabel di bawah ini. Dari tabel tersebut dapat diidentifikasi beberapa kegiatan yang penyerapannya tidak dapat optimal yang akan dianalisis pada sub bab berikutnya.



Tabel III.14

## Anggaran dan Realisasi Kegiatan Kemantren Gondomanan Tahun 2021

No	Program / Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Prosentase
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
A.	Belanja Non Pegawai	3.751.048.129	3.669.328.895	97,82%
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4.654.083.817	4.415.278.991	94,87%
	– Perencanaan, Penganggaran & Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	36.693.040	36.656.823	99,90%
	– Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.572.684.080	3.370.481.014	94,34%
	– Administrasi Umum Perangkat Daerah	119.354.247	119.344.950	99,99%
	– Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	46.516.500	46.044.000	98,98%
	– Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	541.307.550	528.641.998	87,66%
	– Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	337.528.400	314.110.206	93,06%
2.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	303.624.153	300.948.656	99,12%
	– Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kemantren	115.081.134	112.938.100	98,14%
	– Koordinasi Pemeliharaan Sarana & Prasarana Pelayanan Umum	52.007.630	52.007.630	100%
	– Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Mantri Pamong Praja	136.535.389	136.002.926	99,61%
3.	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	219.435.550	219.298.750	99,94%
	– Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan ketertiban Umum	78.608.800	78.472.000	99,83%
	– Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	140.826.750	140.826.750	100%
	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	2.140.288.689	2.097.983.512	98,02%
	– Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	1.123.522.300	1.110.803.000	98,87%
	– Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1.016.766.389	987.180.512	97,09%
B.	Belanja Pegawai	3.566.384.080	3.364.181.014	94,33%
	Jumlah	7.317.432.209	7.033.509.909	96,12%

Sumber : Sekretariat Kemantren Gondomanan, 2021

**a. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya**

Selain telah terlaksananya program dan kegiatan secara optimal, pada beberapa kegiatan juga telah dilakukan efisiensi sebagai berikut:

Tabel III.15

**Data Efisiensi Anggaran Pelaksanaan Kegiatan  
Kemantren Gondomanan Tahun 2021**

No	Program / Kegiatan	Realisasi	Efisiensi	Prosentase
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
A.	Belanja Non Pegawai	3.669.328.895	81.719.234	2,23%
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4.415.278.991	238.804.826	5,41%
	– Perencanaan, Penganggaran & Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	36.656.823	36.217	10%
	– Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.370.481.014	202.203.066	6%
	– Administrasi Umum Perangkat Daerah	119.344.950	9.297	0,01%
	– Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemrthn Daerah	46.044.000	472.500	1,03%
	– Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	528.641.998	12.665.552	2,40%
	– Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemthn. Daerah	314.110.206	23.418.194	7,46%
2.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	300.948.656	2.675.497	0,89%
	– Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemthn di Tk. Kemantren	112.938.100	2.143.034	1,90%
	– Koordinasi Pemeliharaan Sarana & Prasarana Pelayanan Umum	52.007.630	52.007.630	100%
	– Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada MPP	136.002.926	532.463	0,39%
3.	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	219.298.750	136.800	0,06%
	– Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan ketertiban Umum	78.472.000	136.800	0,17%
	– Koordinasi Penerapan dan Penegakan Perda dan Perkada	140.826.750	140.826.750	100%
	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	2.097.983.512	42.305.177	2,02%
	– Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	1.110.803.000	12.719.300	1,15%
	– Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	987.180.512	29.585.877	3%
B.	Belanja Pegawai	3.364.181.014	202.203.066	6,01%
	Jumlah	7.033.509.909	283.922.300	4,04%

Sumber : Sekretariat Kemantren Gondomanan, 2021

Data efisiensi dalam hal ini merupakan data anggaran yang tidak/belum dapat dilaksanakan/direalisasikan dikarenakan sebab-sebab eksternal maupun internal. Selain itu dapat dijelaskan punya penyebab tidak/belum terserapnya anggaran untuk program/kegiatan tersebut. Meskipun demikian, inefisiensi tersebut nilainya cukup kecil sehingga tidak mengganggu tingkat pencapaian tujuan organisasi. Untuk itu perlu diidentifikasi pada pos anggaran dan kode rekening mana saja yang masih rendah capaiannya, untuk dijadikan acuan agar di masa yang akan datang bisa diantisipasi sehingga program/kegiatan dapat direalisasikan secara lebih efisien dan efektif.

Hasil identifikasi menunjukkan efisiensi yang cukup besar terjadi pada program-program :

- a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, terdapat sisa anggaran yang tidak dimanfaatkan dengan pertimbangan efisiensi, penjelasannya adalah bahwa pengeluaran anggaran didasarkan pada kebutuhan riil berjalan tidak berdasarkan anggaran yang tersedia walaupun masih memungkinkan untuk terjadinya pengeluaran. Misalnya kebutuhan pembayaran listrik, telepon dan air dikeluarkan sesuai dengan rekening pemakaian dan batas pagu yang ada dan masih terdapat sisa anggaran. Hal serupa terjadi pada kegiatan yang lainnya antara lain pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas, serta pemeliharaan gedung kantor/rumah dinas.
- b. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan terdapat efisiensi pada sub-sub anggaran kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan yang berupa paket kegiatan pembangunan fisik karena komponen-komponen biayanya menyesuaikan fluktuasi harga pasar, hasil negosiasi, dan tingkat ketepatan perencanaan dengan kondisi yang ada di lapangan.

#### **b. Analisis program kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja**

Jika dirinci secara detail memang tidak seluruh kegiatan dapat dikatakan berhasil walaupun capaian kinerja secara keseluruhan memang masuk kategori Sangat Tinggi. Meskipun demikian deviasi anggaran yang tergolong kecil ini tidak berpengaruh signifikan pada rata-rata umum capaian kinerja.

a. Analisis kegiatan penunjang keberhasilan pencapaian pernyataan kinerja

1) Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik

- a) Kegiatan ini sangat menunjang keberhasilan pencapaian target pada pernyataan kinerja oleh karena merupakan pelayanan langsung kepada warga masyarakat melalui program Paket Komanan (Paket Komplit Gondomanan) yang dulunya dikenal dengan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) dan juga didukung oleh kegiatan fasilitasi lainnya baik penyelenggaraan pemerintahan maupun ketentraman dan ketertiban. Pelaksanaan Paket Komanan (Paket Komplit Gondomanan) yang dulunya dikenal dengan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) dilakukan sesuai dengan aturan yang ada terkait pelayanan dengan maksud agar masyarakat merasa mudah, nyaman dan terlayani dengan ramah oleh petugas.
- b) Gencarnya sosialisasi dan publikasi pelayanan di kecamatan yang dilakukan melalui berbagai media sosial seperti *website*, *facebook*, *instagram*, *youtube* dan buletin Gondoarum menjadikan masyarakat makin memahami dan mendorong untuk makin aktif mengakses berbagai pelayanan dan informasi yang diberikan oleh Kemantren Gondomanan.
- c) Dukungan teknologi informasi berupa aplikasi JSS juga semakin memudahkan sistem prosedur dan konektivitas interface pelayanan Kemantren Gondomanan dengan masyarakat.

2) Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

- a) Kegiatan pemberdayaan masyarakat baik fisik maupun non fisik yang dilaksanakan di kemantren maupun kelurahan melibatkan masyarakat mulai dari proses perencanaan sampai dengan pelaksanaan, pemanfaatan dan pemeliharannya.
- b) Partisipasi, dukungan, keterlibatan dan swadaya masyarakat yang cukup tinggi, sehingga sangat mendukung kelancaran kegiatan.

b. Analisis kegiatan yang menghambat pencapaian pernyataan kinerja

1) Keterbatasan sumber daya manusia (SDM)

Formasi pegawai Kemantren Gondomanan saat ini baru terpenuhi 52% dari kebutuhan sesuai hasil analisis jabatan, tentu ini belum memadai bagi organisasi Kemantren Gondomanan untuk menanggung beban tugas yang semakin berat dengan adanya pelimpahan kewenangan yang semakin besar dan kompleks maupun alokasi dana kelurahan serta perubahan dalam mekanisme anggaran. Beberapa jabatan yang kosong sudah diisi melalui belanja jasa orang perseorangan (tenaga teknis, tenaga bantuan, dan *outsourcing*). Selain itu, dari segi kualitas juga sudah dilakukan berbagai upaya peningkatan kompetensi pegawai. Meskipun demikian, ketika beban kerja semakin bertambah maka kemampuan SDM pun masih dirasa kurang memadai.

2) Kegiatan yang bersifat “penjagaan”

Beberapa kegiatan di program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah khususnya yang bertujuan untuk pemeliharaan dan bersifat penjagaan (misal penggantian suku cadang, pembelian BBM) pada beberapa obyek sulit untuk diprediksi kebutuhannya (kapan perlu ganti suku cadang, penyerapan BBM yang kurang optimal karena mobilitas berkurang, dan sebagainya). Termasuk juga belanja pemakaian listrik/telepon yang tidak bisa tepat sesuai perkiraan dan pagu anggaran yang tersedia. Konsekuensi dari belanja semacam ini adalah target keuangan tidak bisa tercapai 100% (ada sisa anggaran), meskipun target fisik bisa tercapai 100%.

3) Dampak Pandemi Covid-19 yang masih terasa

Beberapa kegiatan di hampir semua program khususnya yang bersifat tatap muka dan mengumpulkan banyak orang dan berpotensi menimbulkan kerumunan terpaksa harus dirasionalisasi (dihapus atau dikurangi volumenya) pada anggaran perubahan, karena menyesuaikan dengan protokol kesehatan dan Instruksi Menteri Dalam Negeri tentang penerapan PPKM. Kalaupun kegiatan tersebut tetap harus dilaksanakan maka harus mengikuti protokol kesehatan secara ketat.

## **B. Inovasi dan Prestasi**

### **1. Inovasi**

Tantangan global penyelenggaraan pemerintahan menuntut aparaturnya untuk bergerak dinamis dan kreatif. Permasalahan dan keterbatasan sumber daya harus dipandang sebagai pemicu gagasan dan ide kreatif yang dapat memberikan manfaat bagi masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung. Pada tahun 2021 ini, Kemantren Gondomanan telah melakukan inovasi, sebagai berikut:

#### **a. Inovasi Paket Pelayanan Komanan**

Kegiatan ini sangat menunjang keberhasilan pencapaian target pada pernyataan kinerja oleh karena merupakan pelayanan langsung kepada warga masyarakat melalui program Paket Komanan (Paket Komplit Gondomanan) yang dulunya dikenal dengan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) dan juga didukung oleh kegiatan fasilitasi lainnya baik penyelenggaraan pemerintahan maupun ketentraman dan ketertiban.

Pelaksanaan Paket Komanan (Paket Komplit Gondomanan) yang dulunya dikenal dengan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) dilakukan sesuai dengan aturan yang ada terkait pelayanan dengan maksud agar masyarakat merasa mudah, nyaman dan terlayani dengan ramah oleh petugas.

#### **b. Sosialisasi Pelayanan secara Virtual**

Berupa pembuatan video pendek tentang sistem prosedur dan tatacara mengakses pelayanan, yang kemudian dipublikasikan melalui website, media sosial dan grup whatsapp warga agar semua lapisan masyarakat semakin memahami dan semakin mudah dalam mengakses layanan.

#### **c. Pendampingan Layanan**

Pendampingan oleh petugas diberikan kepada warga yang memiliki keterbatasan kemampuan mengakses teknologi informasi yang dibutuhkan untuk mendukung layanan. Beberapa warga berusia lanjut, difabel atau keluarga miskin kemungkinan menghadapi masalah dalam mengakses layanan berbasis online, sehingga perlu difasilitasi dan didampingi.

d. Inovasi Gondomanan Bersih Untuk Jogja Istimewa

Kegiatan Gondomanan Bersih untuk Jogja Istimewa adalah gerakan kerja bakti massal untuk menjaga lingkungan dengan melibatkan segenap stakeholders yang bersinergi secara harmonis. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan sinergi dan partisipasi segenap stakeholders dalam menjaga dan mengelola kebersihan dan kenyamanan lingkungan. Inovasi ini sudah berjalan beberapa tahun dan hasil nyata dari inovasi ini adalah Kemantren Gondomanan beberapa kali meraih predikat Kecamatan Adipura.

## 2. Prestasi

Kemantren Gondomanan selama kurun waktu tahun 2021 telah menorehkan beberapa prestasi sebagai berikut :

- a. Peringkat Harapan I Lomba Evaluasi Kinerja Kemantren;
- b. Peringkat I Lomba Perpustakaan Instansi untuk kategori Kemantren;
- c. Peringkat I Lomba PAAR Tingkat Kota Yogyakarta (Kelurahan Prawirodirjan);
- d. Peringkat II Lomba PAAR Tingkat DIY (Kelurahan Prawirodirjan);
- e. Peringkat I Lomba Kearsipan Tingkat Kota Yogyakarta untuk kategori kantor Kelurahan (Kelurahan Ngupasan).

## C. Tindak Lanjut Rekomendasi LKIP Tahun 2020

Dari hasil penilaian terhadap Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) tahun 2020 ada beberapa catatan dan rekomendasi terhadap LKIP Kemantren Gondomanan yang kemudian menjadi komitmen seluruh entitas organisasi Kemantren Gondomanan untuk menindaklanjutinya. Komitmen ini merupakan upaya terus menerus yang dilakukan untuk menuju keadaan dan mencapai kinerja yang lebih baik lagi.

Tabel III.16

## Rekomendasi Inspektorat terhadap LKIP 2020 dan Tindaklanjutnya

No	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Hasil Kegiatan/Bukti dukung
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Pencermatan terhadap dokumen kinerja agar sesuai dengan dokumen perencanaan.	Desk sinkronisasi dokumen kinerja dan dokumen perencanaan setiap akhir tribulan	Berita Acara dan notulensi desk sinkronisasi
2.	Menyajikan data informasi data kinerja sesuai dengan dokumen perencanaan di dalam laporan kinerja.	Desk sinkronisasi dokumen kinerja dan dokumen perencanaan setiap akhir tribulan	Berita Acara dan notulensi desk sinkronisasi
3.	Menggunakan capaian program dan sasaran/IKU organisasi sebagai dasar reward and punishment	Pemberian reward berupa piagam penghargaan bagi pegawai yang dapat mencapai kinerja yang tinggi, dan hukum-an/sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi pegawai yang tidak mencapai target kinerja yang ditetapkan atau jika terbukti melakukan pelanggaran disiplin.	- Berita Acara pemberian reward and punishment; - Piagam penghargaan, - Foto pemberian penghargaan
4.	Meningkatkan pelaksanaan evaluasi internal yang telah dilaksanakan (sasaran, program dan kegiatan) dengan bukti yang cukup atas hasil evaluasi, rekomendasi perbaikan yang diperlukan serta pemantauan atas pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya.	Desk monitoring dan evaluasi program kegiatan setiap akhir tribulan	Berita Acara dan notulensi desk monev
5.	Menyampaikan laporan kinerja tepat waktu	Menaati batas waktu pengiriman laporan kinerja	Bukti pengiriman laporan kinerja
6.	Meningkatkan capaian kinerja	Desk monitoring dan evaluasi program kegiatan setiap akhir tribulan	Berita Acara dan notulensi desk monev

Tindaklanjut rekomendasi terhadap LKIP tahun 2020 dilaksanakan sejak diterimanya hasil penilaian LKIP oleh Inspektorat, yaitu pada bulan Juni 2021. Setelah membaca hasil penilaian dan rekomendasi, Mantri Pamong Praja segera mengadakan koordinasi untuk menyusun langkah-langkah tindak lanjut yang harus dilakukan. Dengan demikian potensi kesalahan dan keterlambatan dapat segera diminimalkan bahkan ditiadakan.



## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dengan memperhatikan hasil pengukuran indikator kinerja sasaran strategis dalam tahun 2021 sebagaimana yang telah dipaparkan dalam bab-bab sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa secara umum kinerja Kemantren Gondomanan telah berhasil mencapai target yang telah ditetapkan pada dokumen Rencana Strategis (Renstra) OPD. Baik pada indikator sasaran maupun pada indikator kinerja program keduanya menunjukkan pencapaian target yang sangat baik. Hal itu menunjukkan segala upaya yang dilakukan Kemantren Gondomanan secara umum dapat dikatakan berhasil dalam mencapai target.

Pelaksanaan kinerja Kemantren Gondomanan yang dilaksanakan oleh aparat kemantren tidak lepas dari sinergitas antara masyarakat, *stakeholders* se-Kemantren Gondomanan, Kelurahan Ngupasan, Kelurahan Prawirodirjan, dan OPD Pemerintah Kota Yogyakarta yang terkait langsung dengan kinerja Kemantren Gondomanan. Untuk itu koordinasi antar lini harus terus ditingkatkan sehingga hasil pencapaian tujuan dan kinerja organisasi pada tahun yang akan datang akan semakin baik.

#### **B. Rencana Tindak Lanjut**

Dengan memperhatikan paparan data dalam laporan ini dimulai dari Bab I sampai dengan Bab III akan dapat diambil beberapa kesimpulan yang menjadikan catatan untuk peningkatan kelancaran pelaksanaan tugas sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kemantren Gondomanan pada tahun-tahun yang akan datang. Disamping itu, beberapa rekomendasi terhadap laporan LKIP tahun sebelumnya (2020) juga menjadi perhatian dalam menentukan tindaklanjut untuk upaya perbaikan.

Melihat keberhasilan secara umum capaian kinerja Kemantren Gondomanan dan juga melihat beberapa faktor pendukung dan adanya catatan kecil hambatan dalam pelaksanaan kerjanya, maka rencana tindak lanjut yang akan dilakukan sebagai berikut:

1. Penguatan perencanaan kegiatan pada awal penyusunan kegiatan.
2. Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala dan simultan sebagai upaya untukantisipasi dan pemecahan masalah atau hambatan yang dapat

mempengaruhi jalannya kinerja instansi.

3. Memperkuat koordinasi, sinergi dan komunikasi internal dan eksternal sehingga terjadi kesamaan persepsi dan gerak dalam menjalankan visi dan misi instansi.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kemantren Gondomanan Kota Yogyakarta, semoga dapat memberikan gambaran yang memadai tentang Kinerja Kemantren Gondomanan Tahun Anggaran 2021 dan bermanfaat bagi peningkatan kinerja di masa yang akan datang.